

PERSEPSI MUZAKKI
TENTANG KONTROVERSI HUKUM ZAKAT PROFESI
DAN PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT KESADARAN BERZAKAT
(Survey pada Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (SE.Sy)
pada Jurusan Muamalat Ekonomi Perbankan Islam



Disusun Oleh :

S I L F I A

Nomor Induk: 06320215

FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI
CIREBON
2011 M/1432 H

PERSEPSI MUZAKKI
TENTANG KONTROVERSI HUKUM ZAKAT PROFESI
DAN PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT KESADARAN BERZAKAT
(Survey pada Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon)

S I L F I A
Nomor Induk: 06320215

FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SYEKH NURJATI
CIREBON
2011 M/1432 H

IKHTISAR

Silfia. Persepsi *Muzakki* tentang Kontroversi Hukum Zakat Profesi dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kesadaran Berzakat (Survey pada Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon)

Zakat merupakan salah satu bentuk ibadah yang Allah wajibkan bagi umat Islam. Kewajibannya telah dijelaskan dalam Al-qur'an maupun sunah bahkan dalam kitab-kitab fiqh. Meski demikian, pembahasan mengenai hukum zakat ternyata masih menyisakan persoalan. Berkenaan dengan zakat *mal* yang selalu dinamis, fenomena yang paling menonjol dari dunia perekonomian saat ini adalah semakin kecil keterlibatan langsung sumber daya manusia dalam sektor produksi dan semakin membesarnya sektor jasa. Sehingga muncul istilah baru dalam ruang lingkup zakat yakni istilah zakat profesi, yang dasar hukumnya tidak pernah dijelaskan secara detail dalam Al-Qur'an maupun sunah. Sedangkan dalam masalah ibadah umat Islam diharuskan berpegang pada dasar hukum yang jelas. Hal ini kemudian menimbulkan berbagai persepsi yang berujung pada pro dan kontra di berbagai kalangan. Maka tidak menutup kemungkinan, bahwa fakta yang berkembang di masyarakat saat ini adalah kontroversi mengenai hukum zakat profesi akan memberikan pengaruh pada tingkat kesadaran berzakat para *muzakki*. Oleh karenanya peneliti menilai perlu adanya penelitian mengenai hal ini.

Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi bagaimanakah persepsi *muzakki* tentang kontroversi hukum zakat profesi, tingkat kesadaran berzakat *muzakki* dan pengaruh yang ditimbulkan dari kontroversi hukum zakat profesi terhadap tingkat kesadaran berzakat *muzakki*.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi *muzakki* tentang kontroversi hukum zakat profesi, tingkat kesadaran berzakat para *muzakki* dan pengaruh yang ditimbulkan dari kontroversi hukum zakat profesi terhadap tingkat kesadaran berzakat *muzakki*.

Penelitian dilakukan dengan metode kuantitatif, dimana pengumpulan datanya dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner, wawancara, dan telaah dokumen. Instrumen penelitian diuji dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Kemudian data dianalisis dengan menggunakan koefisien korelasi *spearman rank*, koefisien regresi, koefisien determinasi, serta uji hipotesis.

Hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa sebagian besar *muzakki* sepakat dengan diwajibkannya zakat profesi. Dan kesadaran berzakat *muzakki* dapat dikatakan cukup baik. Hubungan antara kontroversi hukum zakat profesi dengan kesadaran berzakat sangat rendah, dengan korelasi *spearman rank* sebesar 0,163. Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi, pengaruh yang ditimbulkan dari kontroversi hukum zakat profesi terhadap kesadaran berzakat *muzakki* hanya sekitar 2,66%. Ini diperkuat dengan perhitungan koefisien regresi yang menunjukkan bahwa apabila nilai persepsi *muzakki* tentang kontroversi hukum zakat profesi bertambah 1, maka nilai rata-rata tingkat kesadaran berzakat justru naik sebesar 24,467. Ini membuktikan bahwa kontroversi hukum zakat profesi tidak menghalangi *muzakki* untuk tetap menunaikan kewajiban zakatnya.

PERSETUJUAN

**PERSEPSI *MUZAKKI* TENTANG KONTROVERSI HUKUM ZAKAT PROFESI DAN
PENGARUHNYA TERHADAP TINGKAT KESADARAN BERZAKAT
(Survey pada Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon)**

Disusun Oleh:

**SILFIA
Nomor Induk: 06320215**

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Drs. Amir, M.Ag
NIP: 19650313199402 1 001**

**Aan Jaelani, M.Ag
NIP: 19750601200501 1 008**

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Perbankan Islam (EPI)

**Ayus Ahmad Yusuf, SE, M.Si
NIP: 19710801 200003 1 002**

NOTA DINAS

Kepada Yth.
**Dekan Fakultas Syariah
dan Ekonomi Islam**
IAIN Syekh Nurjati
Cirebon
Di,-
CIREBON

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaahan, arahan dan koreksi terhadap penulisan Skripsi **Silfia, NIM: 06320215**, berjudul **“Persepsi Muzakkitentang Kontroversi Hukum Zakat Profesi dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kesadaran Berzakat (Survey pada Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon).”**Maka kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada fakulas syariah dan ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqasahkan.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Cirebon, Desember 2010

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Amir, M.Ag
NIP: 19650313199402 1 001

Aan Jaclani, M.Ag
NIP: 19750601200501 1 008

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Perbankan Islam (EPI)

Ayus Ahmad Yusuf, SE, M.Si
NIP: 19710801 200003 1 002

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim.

Dengan ini, saya menyaakan bahwa skripsi dengan judul: **“Persepsi Muzakkitentang Kontroversi Hukum Zakat Profesi dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kesadaran Berzakat (Survey pada Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon)”** ini beserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya idak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, Desember 2010
Yang membuat pernyataan,

SILFIA
NIM. 06320215

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**Persepsi *Muzakki* tentang Kontroversi Hukum Zakat Profesi dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kesadaran Berzakat (Survey pada Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon)**” oleh Silfia, Nomor Pokok: 06320215, telah diujikan dalam sidang munaqasah IAIN Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 28 Januari 2011.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy)** di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Perbankan Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

Cirebon, Desember 2010

Sidang Munaqasah

Ketua
Merangkap Anggota

Sekretaris
Merangkap Anggota

Dr. H. Kosim, M.Ag
19640104 199203 1 004

Drs. Wasman, M.Ag
19590107 199201 1 001

Anggota

Penguji I,

Penguji II,

Dr. H. Kosim, M.Ag
19640104 199203 1 004

Ahmad Rofi'i, M.A
19760725 200112 1 002

DARTAR RIWAYAT HIDUP



1. Nama : SILFIA
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Cirebon, 25 Februari 1988
3. Alamat :Jl. Let Jend. Soeprapto, Blok Kliwon Rt/Rw
03/03 No.22, Ciledug Kulon. Kec. Ciledug Kab.
Cirebon. 45188
4. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Salim Ahmad Sungkar
 - b. Ibu : Fathiyah Ali Bana'mah
5. Riwayat Pendidikan
 - a. SDN 1 Ciledug Kulon, diterima tahun 1994 sampai tahun 2000
 - b. SMPN 1 Ciledug, diterima tahun 2000 sampai tahun 2003
 - c. SMAN 1 Babakan, diterima tahun 2003 sampai tahun 2006
 - d. Diterima di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program (Strata-1) Ekonomi Perbankan Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon pada tahun 2006 lulus tahun 2011.

PERSEMBAHAN

**When yau were born, you cried and the world rejoiced.
Live your life in such a manner. That when you die, the world cries and you
rejoice...**

Alhamdulillah, atas izinNya setiap nafas menjadi berarti, setiap langkah menjadi bukti pengabdianku padaNya. Shalawat dan salam tertuju pada sang pionir sejati Muhammad Rasulullah saw, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya...

Untuk kedua orang tuaku...bapak Salim Ahmad Sungkar dan ibu Fathiyah Ali Bana'mah, yang tak pernah berhenti mengalirkan cinta dalam darahku.. Terima kasih untuk dukungan yang kalian bingkiskan dalam do'a, ku persembahkan karya ini sebagai bukti baktiku padamu mom... Untuk kedua saudaraku, Aisyah Amelia dan Muhamad Wildan, aku ingin selamanya berbagi dengan kalian, terima kasih karena selalu ada untukku dan mendukung setiap langkah juangku....

Untuk para motivator ku... naRzZiest, BERES dan rekan-rekan EPI-3. Kalianlah semangatku. Terima kasih karena telah membangunkan dan mengobati lukaku ketika aku jatuh, aku beruntung karena Tuhan mempertemukan aku dengan kalian.. Kawan, semoga selamanya kita satu....

Untuk insan se-djiwa Teater Awal IAIN Sekh Nurjati Cirebon, para pelukis cinta tak mengenal siapa..... Terima kasih untuk pelajaran hidup yang kalian berikan. Kesederhanaan dan kebersamaan yang kalian tawarkan, mengajarku makna hidup yang sesungguhnya. Aku BISA karena kalian! Dan selamanya, aku bangga menjadi bagian dari kalian....

Chipy..

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, penguasa alam semesta yang memberi kekuatan dan kesabaran kepada penulis untuk tetap teguh dalam menjalankan kewajiban sebagai hamba-Nya dan yang telah menggerakkan hati penulis untuk selalu berusaha menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul *“Persepsi Muzakki tentang Kontroversi Hukum Zakat Profesi dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kesadaran Berzakat (Survey pada Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon)”*. Tanpa kekuatan dan ridho-Nya tidak ada sesuatu yang dapat dikerjakan. Shalawat serta salam semoga tercurahkan keharibaan Nabi besar Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Serta berkat bantuan dari berbagai pihak baik dari segi moral maupun materil yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini. oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penghargaan yang sebesar-besarnya, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Maksum, MA., Pgs. Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Kosim, M.Ag., Pgs. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Ayus Ahmad Yusuf, SE, M.Si., ketua jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
4. Bapak Drs. Amir, M.Ag selaku pembimbing I.
5. Bapak Aan Jaelani, M.Ag selaku pembimbing II.

6. Seluruh Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon, terima kasih atas kesediaannya berpartisipasi dalam penelitian ini.
7. Seluruh Staf Karyawan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang telah meluncurkan berbagai administrasi yang penulis butuhkan.
8. Keluargaku tercinta, terima kasih atas doa dan dukungan moril serta materi yang kalian berikan.
9. Rekan-rekan jurusan Muamalah Ekonomi Perbankan Islam, khususnya keluarga besar EPI-3, terima kasih atas motivasi dan dorongan yang sangat berarti bagi penulis.
10. Dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, semoga hasil karya ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi langkah awal bagi penulis untuk dapat mewujudkan cita-cita dan harapan seluruh keluarga.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, Januari 2011

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

IKHTISAR

PERSETUJUAN PEMBIMBING

NOTA DINAS

PERNYATAAN OTENTISITAS

LEMBAR PENGESAHAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

PERSEMBAHAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang Masalah	1
	B. Perumusan Masalah	4
	C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
	D. Penelitian yang Relevan	6
	E. Kerangka Pemikiran	9
	F. Hipotesis Penelitian	12
	G. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II	KONTROVERSI HUKUM ZAKAT PROFESI	
	DAN KESADARAN BERZAKAT.....	15
	A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat Profesi	15
	B. Ruang Lingkup Zakat Profesi	17
	C. Nishab, Prosentase dan Perhitungan Zakat Profesi	19
	D. Seputar Kontroversi Hukum Zakat Profesi	25
	E. Kesadaran Berzakat.....	33

BAB III	METODE PENELITIAN.....	39
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	39
	B. Penerapan Operasional Variabel	39
	C. Sumber Data.....	43
	D. Metode Pengumpulan Data	44
	E. Populasi dan Sampel	46
	F. Uji Instrumen Penelitian	47
	G. Pengolahan dan Analisis Data	50
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	54
	A. Hasil Penelitian.....	54
	1. Persepsi <i>Muzakki</i> tentang Kontroversi Hukum Zakat Profesi.....	54
	2. Kesadaran Zakat (Perilaku Zakat) Muzakki	66
	3. Uji Instrumen Penelitian	78
	B. Pembahasan.....	87
	1. Gambaran mengenai Pengaruh Persepsi Muzakki tentang Kontroversi Hukum Zakat Profesi terhadap Tingkat Kesadaran Berzakat.....	87
	2. Analisis Ekonomi	93
BAB V	PENUTUP.....	97
	A. Kesimpulan.....	97
	B. Saran.....	99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

3.1. Operasionalisasi variabel penelitian	40
3.2. Pedoman Nilai/Skor Angket	45
3.3. Tabel Interpretasi Hubungan	
4.1. Pada dasarnya tidak semua jenis harta wajib dikeluarkan zakatnya	56
4.2. Tidak wajib hukumnya mengeluarkan zakat atas harta yang tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al-qu'an	56
4.3. Zakat hasil kerja profesi merupakan salah satu aspek zakat yang baru dikenal di era modern	57
4.4. Zakat hasil kerja profesi merupakan aspek zakat yang ketetapan hukumnya masih bersifat kontroversial	58
4.5. Perbedaan pendapat mengenai hukum zakat profesi beserta syarat dan ketentuannya masih terjadi di kalangan ulama kontemporer hingga kini	58
4.6. Al-qur'an dan sunah tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi	59
4.7. Zakat hasil kerja profesi tidak pernah dikenal pada masa Rasulullah atau pada masa terbentuknya madzhab fiqh	59
4.8. Zakat hasil kerja profesi merupakan produk ijtihad para ulama masa kini	60
4.9. Mereka yang dikenai kewajiban zakat pada hakikatnya bukan karena jenis profesi yang mereka jalani, melainkan mereka telah masuk dalam kategori orang kaya/mampu	61
4.10. Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai adanya syarat dikenakannya zakat bagi sebuah profesi	61
4.11. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa zakat profesi	

hanya dikenakan bagi para pekerja professional yang mempunyai penghasilan tinggi. Sedangkan sebagian lain berpendapat bahwa zakat profesi dikenakan bagi seluruh jenis profesi	62
4.12. Akibatnya muncul perbedaan pendapat mengenai ketetapan hukum zakat profesi. Sebagian mewajibkan dan sebagian lainnya tidak mewajibkan	62
4.13. Terdapat perbedaan pendapat mengenai ketentuan nishab zakat profesi. Sebagian meng- <i>qiyas</i> -kannya dengan zakat pertanian dan sebagian lain meng- <i>qiyas</i> -kannya dengan zakat emas dan perak	63
4.14. Ketentuan masa haul pun masih menjadi perdebatan. Sebagian mensyaratkan masa setahun dan sebagian lain mensyaratkan untuk mengeluarkannya pada waktu harta tersebut diperoleh	64
4.15. Mengenai prosentase perhitungannya, sebagian meng- <i>qiyas</i> -kan dengan zakat pertanian yakni sebesar 5% atau 10% dan sebagian lain menyamakan perhitungannya dengan zakat pada umumnya yakni sebesar 2,5%	64
4.16. Rekapiulasi Persepsi <i>Muzakki</i> tentang Kontroversi Hukum Zakat Profesi Prosentase Variabel X	65
4.17. Dalam masalah ibadah kita diharuskan mengikuti dalil yang jelas dan shahih, dan dalam hal ini zakat profesi termasuk dalam aspek zakat yang ketetapan hukumnya masih belum jelas	68
4.18. Tidak diharuskan adanya tafsir baru mengenai ayat-ayat Al-qur'an dalam konteks harta benda yang harus dizakati	68
4.19. Zakat masuk dalam kategori ibadah mahdah yang telah permanen dan tidak menerima ijtihad didalamnya	69
4.20. Bapak/ibu terganggu dengan adanya fenomena kontroversi hukum zakat profesi, terlebih menyangkut kewajiban berzakat. Mengingat bapak/ibu masuk dalam kategori mereka mereka yang berprofesi	70
4.21. Bapak/ibu sepakat dengan tidak diwajibkannya zakat profesi	70

4.22. Bapak/ibu ragu untuk menunaikan kewajiban zakat profesi	71
4.23. Pada dasarnya ketetapan nishab zakat serta perhitungannya hanya dapat dilakukan dengan pendekatan tafsili, dan tidak dengan pendekatan lain (seperti pendekatan ijmal)	71
4.24. Perbedaan penentuan nishab zakat profesi menyebabkan bapak/ibu sulit dalam menentukan batas minimal zakat	72
4.25. Perbedaan penentuan adanya masa haul menyebabkan bapak/ibu sulit dalam menetapkan waktu mengeluarkan zakat	73
4.26. Perbedaan penentuan besarnya prosentase perhitungan zakat profesi menyebabkan bapak/ibu sulit menghitung dana zakat yang harus dikeluarkan	73
4.27. Bapak/ibu menjadi lebih fleksibel dalam menunaikan zakat profesi (tidak sepenuhnya mengikuti syarat dan ketentuan)	74
4.28. Mengingat ketentuan nishab, haul dan prosentase zakat profesi masih belum jelas, maka kewajiban menunaikan zakat hasil kerja profesi dapat digantikan dalam bentuk infaq dan shodaqoh yang tidak terikat oleh beberapa ketentuan	74
4.29. Infaq dan shodaqoh pada hakikatnya sama dengan zakat dalam hal membersihkan harta	75
4.30. Bapak/ibu lebih memilih menunaikan infaq dan shodaqoh daripada zakat profesi	76
4.31. Perbedaan pendapat mengenai hukum dan beberapa ketentuan zakat profesi berpengaruh pada kesadaran berzakat masyarakat pada umumnya	76
4.32. Rekapitulasi Kesadaran Berzakat Prosentase Variabel Y	77
4.33. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Uji Validitas Instrumen Variabel X (Persepsi Muzakki tentang Kontroversi Hukum Zakat Profesi)	80
4.34. Rekapitulasi Hasil Perhitungan Uji Validitas Instrumen Variabel Y (Kesadaran Berzakat)	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan ibadah yang memiliki fungsi dan peranan sangat strategis. Disamping zakat sebagai bentuk *taqarrub* (pendekatan diri) kepada Allah, zakat juga merupakan sarana penting untuk membersihkan jiwa manusia dari noda-noda hati dan sifat-sifat tercela seperti kikir, rakus dan egois. Selain itu zakat juga dapat memberikan solusi untuk menanggulangi problematika krisis ekonomi yang melanda umat manusia.

Begitu pentingnya zakat, sehingga Allah menetapkan kewajiban untuk menunaikannya, sebagaimana dijelaskan dalam firmanNya:

Q.S. Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِمْوَا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'[44].

Menurut garis besarnya, zakat dibagi menjadi dua bagian yakni zakat *nafs* dan zakat *m l*, dan salah satu dari beberapa jenis zakat yang tergolong dalam zakat *m l* adalah zakat profesi. Harta zakat profesi termasuk dalam kelompok

zakat *m l*, yaitu *al-m l al-mustaf d* (kekayaan yang diperoleh oleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang sesuai dengan syariat agama).¹

Namun, seperti yang sedang marak dibicarakan saat ini, kewajiban mengeluarkan zakat profesi mulai menjadi perdebatan dikalangan para ulama. Hal ini bermula dari ijthad Syaikh Al-Qardhawi mengenai kewajiban mengeluarkan zakat profesi yang dituangkan dalam fqih zakat beliau. Para penyeru zakat ini menyatakan bahwa,

Jika petani saja diwajibkan mengeluarkan zakatnya, maka para dokter, eksekutif, karyawan lebih utama untuk mengeluarkan zakat karena kerjanya lebih ringan dan gajinya dalam beberapa bulan sudah melebihi nishab.²

Pernyataan tersebut kemudian ditentang oleh beberapa kalangan yang menyatakan bahwa,

Zakat profesi tidak ada dalam sejarah Islam dan tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw. Bahkan Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat ini. Terlebih, zakat adalah perkara ibadah *mahdah* yang telah permanen dan tidak menerima ijthad di dalamnya. Maka, jikalau membuat aturan baru dikhawatirkan justru akan menjerumuskan.³

Di sisi lain, masyarakat kita saat ini khususnya mereka yang menjadi target utama diwajibkannya zakat profesi, seperti pegawai negeri, dokter, insinyur, artis dan lain sebagainya, yang dalam hal ini berperan sebagai *muzakki* (orang yang dikenai kewajiban mengeluarkan zakat) merasa dibingungkan dengan

¹ *Ensiklopedi Islam, jilid 5 cet. 1*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1993), h. 227

² Apriansyah, *Kontroversi zakat profesi*, 2009,

<http://www.facebook.com/topic.php?uid=50167786247&topic=11301> Diakses pada 19 Januari 2010

³ Abisyakir, *Kontroversi Hukum "Zakat Profesi"*, 2008, <http://abisyakir.wordpress/category/01-islam/page/2/>. Diakses pada 19 Januari 2010.

adanya kontroversi yang terjadi saat ini. Mereka yang seharusnya dapat menentukan pilihan untuk menunaikan kewajiban zakat (bagi mereka yang belum menunaikan zakat profesi) atau mereka yang sebelumnya yakin atas sebagian harta yang telah mereka keluarkan sebagai kewajiban menunaikan zakat *m l* (bagi mereka yang telah menunaikan zakat profesi), kini mulai merasa ragu.

Berkaitan dengan hal ini, peneliti mencoba untuk mengangkat permasalahan kontroversi tersebut ke permukaan, lalu menghubungkannya dengan perilaku zakat masyarakat kita saat ini. Dan profesi dosen selaku profesi yang mengadepankan pendidikan, ternyata cukup menarik perhatian peneliti untuk dapat menggali informasi di dalamnya. Bagaimana perilaku zakat mereka dan persepsi mereka tentang kontroversi zakat profesi yang sedang marak dibicarakan, mengingat dosen (tenaga pendidik) termasuk dalam kategori profesi yang wajib dikeluarkan zakatnya (jika telah memenuhi syarat dan ketentuan zakat). Sudahkah mereka menunaikan kewajibannya selaku *muzakki*? Sementara sebagian atau mungkin keseluruhan dari mereka mengetahui hukum dan ketentuan membayar zakat. Lebih lagi bagi mereka yang mengajar di perguruan tinggi-perguruan tinggi yang berlabel Islam.

Lalu yang menjadi permasalahan sekarang adalah mungkinkah kontroversi mengenai hukum zakat profesi tersebut memberikan pengaruh pada tingkat kesadaran berzakat masyarakat kita, khususnya bagi mereka berprofesi sebagai dosen? Inilah yang kemudian mendorong peneliti untuk mengambil judul *“Persepsi Muzakki Tentang Kontroversi Hukum Zakat Profesi dan Pengaruhnya*

Terhadap Tingkat Kesadaran Berzakat Survey Pada Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon” sebagai tugas akhir perkuliahan.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah fiqh zakat, yang lebih difokuskan kepada permasalahan mengenai zakat profesi.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris, berupa studi lapangan di lokasi penelitian, yaitu kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah penelitian terhadap persepsi *muzakki* tentang kontroversi hukum zakat profesi, dimana persepsi tersebut berpengaruh terhadap tingkat kesadaran berzakat.

2. Rumusan Masalah

Bercermin pada latar belakang masalah, maka beberapa masalah yang dapat dirumuskan antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi *muzakki* (dosen) tentang fenomena kontroversi hukum zakat profesi?

2. Bagaimana tingkat kesadaran berzakat (perilaku zakat) *muzakki*?
3. Apakah terdapat pengaruh/hubungan persepsi *muzakki* tentang kontroversi hukum zakat profesi terhadap tingkat kesadaran berzakat?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui persepsi *muzakki* tentang kontroversi hukum zakat profesi.
- b. Untuk mengetahui tingkat kesadaran berzakat (perilaku zakat) *muzakki*.
- c. Untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang ditimbulkan dari persepsi *muzakki* tentang kontroversi hukum zakat profesi terhadap tingkat kesadaran berzakat *muzakki* (dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon).

2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Peneliti

Selain memberikan pengalaman dan menambah wawasan di bidang ekonomi Islam, khususnya masalah zakat, peneliti berharap hasil penelitian dapat menentukan langkah peneliti ke depan dalam menunaikan kewajiban berzakat di kemudian hari.

b. Responden

Bagi responden, khususnya bagi mereka yang menjadi target penelitian, yakni para dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai potret perilaku zakat dan kesadaran membayar zakat masyarakat kita saat ini, mengingat zakat dapat dijadikan sebagai solusi dalam meningkatkan perekonomian umat.

c. Lembaga Akademik

Khususnya bagi para akademisi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai media penyampaian informasi mengenai maraknya kontroversi hukum zakat profesi, dalam rangka pengembangan wawasan keilmuan di bidang ekonomi Islam, khususnya mengenai zakat.

D. Penelitian yang Relevan

Dari hasil penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan untuk mengetahui hasil-hasil penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan permasalahan penelitian yang akan dilakukan, ditemukan beberapa hasil peneliian sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa STAIN Cirebon, Jurusan Syariah, Program Studi Al-Akhwat As-Syakhsyah pada tahun 2006 dengan judul *Zakat Profesi Dalam Perspektif Ulama Cirebon*. Penelitian tersebut mengupas tentang pandangan para ulama Cirebon mengenai zakat profesi, khususnya mengenai landasan hukum zakat profesi, batasan jenis profesi yang harus

dikeluarkan zakatnya, berapa *nishab* yang tepat agar konsep keadilan dalam pendistribusian harta dapat ditegakkan, serta cara mengeluarkan zakat profesi menurut ulama Cirebon. Dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa menurut ulama Cirebon hukum zakat profesi wajib berdasarkan Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 267, jenis profesi yang harus dikeluarkan zakatnya yakni semua hasil usaha yang mendatangkan hasil (uang) yang relatif banyak dengan cara yang mudah melalui keahlian tertentu, menurut ulama Cirebon *nishab* zakat profesi disamakan dengan *nishab* emas yaitu 90 gram emas murni (24 K), zakat profesi dikeluarkan setelah satu tahun (haul) sebesar 2,5% setelah dikurangi kebutuhan primer dan teknik pembayarannya dapat di *ta'jil* setiap bulan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syariah pada tahun 2009 dengan judul *Hukum Zakat Profesi Menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis*. Penelitian tersebut menyoroti masalah perbedaan hukum zakat profesi antara Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Dewan Hisbah Persis. Dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa menurut Majelis Tarjih Muhammadiyah zakat profesi wajib dengan dasar hukum surat Al-Baqarah ayat 267, sedangkan menurut Dewan Hisbah Persis zakat profesi tidak wajib hukumnya dan hanya memutuskan bahwa harta yang tidak terkena kewajiban zakat termasuk hasil profesi hanya dikenai kewajiban membayar infaq yang besarnya tergantung kebutuhan Islam terhadap harta tersebut.

3. Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya, Jurusan Siyasah Jinayah (SJ) pada tahun 2009 dengan judul *Penentuan Prosentase Zakat Profesi (Studi Komparatif Antara Pendapat Yusuf Qardawi dan Muhammad Al-Gazali)*. Penelitian tersebut mengupas mengenai tipologi berpikir, metode *ijtihad*, serta pendapat Yusuf Qardhawi dan Muhammad Al-Gazali tentang penentuan prosentase zakat profesi. Dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa untuk tipologi berpikir Yusuf Qardhawi menggunakan realitas dalam berijtihad, fiqh selalu didasarkan pada pertimbangan *maslahah* dan *mafsadat*, sedangkan Al-Gazali selalu mengedepankan Al-Qur'an melebihi dari permasalahan *maslahah* dan *mafsadat*. Untuk metode *ijtihad*, Yusuf Qardhawi menggunakan *qiyas* dan persoalan-persoalan ibadah yang tidak murni, sedangkan Al-Gazali memandang *qiyas* sebagai alat yang digunakan pada waktu tidak ada *nash*, baik Al-Qur'an maupun hadits. Dan untuk menentukan prosentase dari hasil *qiyas*, Yusuf Qardhawi menganalogikan zakat profesi dengan zakat perniagaan atau perdagangan, sehingga prosentase zakat apapun jenisnya adalah 2,5% dari keseluruhan hasil profesi setelah dikurangi kebutuhan pokok, sedangkan Al-Gazali menganalogikan dengan zakat pertanian yakni sebesar 10%.

Dari ketiga penelitian terdahulu tersebut, secara umum memang membahas mengenai hukum zakat profesi menurut para ulama. Namun, apabila dilihat dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian-penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Ketiga penelitian tersebut lebih

menyoroti masalah perbedaan pendapat para ulama mengenai keberadaan zakat profesi beserta *nishab* dan cara perhitungannya. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengangkat masalah maraknya kontroversi hukum zakat profesi yang mungkin menimbulkan pengaruh terhadap tingkat kesadaran berzakat masyarakat kita saat ini. Jika sasaran ketiga penelitian terdahulu tersebut adalah pemaparan para ulama mengenai zakat profesi, yang menjadikan ketiga penelitian tersebut menggunakan metode kualitatif normatif dalam pencarian datanya, maka sasaran dari penelitian yang akan dilakukan adalah persepsi para dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon mengenai maraknya kontroversi zakat profesi yang sedang terjadi yang kemudian dihubungkan dengan tingkat kesadaran berzakat mereka, dan tentunya penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dalam pencarian datanya.

Dengan demikian, penulis memandang bahwa penelitian dengan judul *“Persepsi Muzakki tentang Kontroversi Hukum Zakat Profesi dan Pengaruhnya Terhadap Tingkat Kesadaran Berzakat (Survey Pada Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon)”* layak untuk dilakukan.

E. Kerangka Pemikiran

Zakat merupakan salah satu dari 5 (lima) kewajiban pokok (rukun) yang Allah wajibkan kepada umat Islam. Kesadaran umat Islam untuk menunaikan kewajiban zakat sebagai salah satu perintah mutlak dari Allah, yang tidak hanya memiliki implikasi pahala bagi pelakunya (*muzakki*), melainkan juga akan

memberikan dampak sosial yang luas. Ketimpangan sistem sosial berupa kemiskinan dan ketidakberdayaan kaum dhuafa, akan terjawab melalui zakat.

Namun, seperti kita ketahui bersama, bahwa keberadaan zakat profesi yang merupakan salah satu dari berbagai jenis zakat yang ada, telah mendulang kontroversi di kalangan para ulama. Al-Qur'an dan As-Sunnah tidak memuat aturan hukum yang detail mengenai hal ini. Sedangkan hukum islam itu sendiri adalah refleksi dari peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi ketika hukum itu ditetapkan, dan ini menandakan bahwa pada zaman Rasulullah tidak ada peristiwa yang berkaitan dengan diwajibkannya zakat profesi, sehingga tidak ditetapkan hukumnya. Inilah faktor utama yang mendorong terjadinya kontroversi mengenai hukum zakat profesi dikalangan ulama dan demikian juga di tingkat masyarakat.

Berdasarkan fenomena yang ada, hal ini tentu menjadi pertimbangan penting bagi para *muzakki*, khususnya bagi mereka yang memiliki pekerjaan yang masuk dalam kategori profesi yang wajib dikeluarkan zakatnya dan pendapatannya telah mencapai nishab. Dalam hal ini, sangatlah wajar jika sebagian *muzakki* menjadi ragu akan kewajiban zakat yang seharusnya mereka keluarkan.

Namun, tidak sedikit pula dari mereka (*muzakki*) yang justru memberikan respon positif terhadap munculnya hukum diwajibkannya mengeluarkan zakat profesi tersebut, tanpa mempedulikan maraknya kontroversi yang sedang terjadi,

bagi mereka yang penting adalah mereka mengeluarkan sebagian harta mereka untuk tujuan kebaikan.

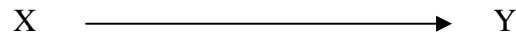
Dan jika dilihat dari sudut pandang lain, perilaku zakat masyarakat kita dapat dikatakan sangat memprihatinkan. Sebagian besar dari masyarakat muslim kita saat ini belum mengerti mengenai beberapa hal tentang ketentuan zakat, terutama menyangkut zakat profesi, dan ini berpengaruh terhadap kesadaran untuk menunaikannya.

Lain halnya bagi mereka yang berprofesi sebagai dosen (muslim). Pemahaman mereka mengenai syarat dan ketentuan membayar zakat tentu lebih baik daripada masyarakat pada umumnya. Apalagi bagi mereka yang mengajar di perguruan tinggi yang berlabel Islam seperti IAIN Syekh Nurjaya Cirebon. Berbicara mengenai hukum Islam tentu sudah menjadi hal yang sangat biasa bagi mereka, termasuk di dalamnya adalah fenomena kontroversi zakat profesi yang masih marak menjadi perbincangan saat ini. Selain sebagai para akademisi, profesi mereka juga termasuk dalam kategori profesi yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Lalu yang menjadi sorotan peneliti sekarang, jika mereka memahami betul kontroversi tersebut, maka sebagian dari mereka tentu memiliki persepsi yang berbeda dalam memandang permasalahan mengenai kontroversi hukum zakat profesi tersebut. Jika hal itu terjadi, maka tingkat kesadaran berzakat para dosen pun tentu menjadi beragam. Dan jika demikian, maka dapat diprediksi

bahwa persepsi *muzakki* tentang kontroversi zakat profesi ikut mempengaruhi kesadaran berzakat mereka.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan ke dalam kerangka berpikir yang menunjukkan dua variabel yaitu, persepsi *muzakki* tentang kontroversi zakat profesi (variabel X), dan tingkat kesadaran berzakat (variabel Y). Untuk menjelaskannya dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:



Dimana:

X : Persepsi *muzakki* tentang kontroversi hukum zakat profesi

Y : Tingkat kesadaran berzakat

—————> : Garis yang menggambarkan hubungan/pengaruh

Untuk mendapatkan jawabannya, maka perlunya diadakan penelitian mengenai hal ini. Apakah persepsi *muzakki* tentang kontroversi hukum zakat profesi tersebut berpengaruh terhadap tingkat kesadaran berzakat (khususnya di kalangan dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon) ataukah justru sama sekali tidak berpengaruh?

F. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

Ho : Tidak terdapat pengaruh yang ditimbulkan dari persepsi *muzakki* tentang kontroversi hukum zakat profesi terhadap tingkat kesadaran berzakat.

Ha : Terdapat pengaruh yang ditimbulkan dari persepsi *muzakki* tentang kontroversi hukum zakat profesi terhadap tingkat kesadaran berzakat.

G. Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penelitian skripsi ini penulis menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan: pada bab pertama ini peneliti akan memulai dengan pemaparan mengenai latar belakang masalah yang diteliti, dimana peneliti dapat mendeskripsikan berbagai problematika atau fenomena yang terkait dengan tema penelitian. Setelah itu peneliti akan mencoba merumuskan masalah yang ada, berupa pertanyaan penelitian yang akan dikembangkan menjadi sebuah instrumen pengumpul data. Selanjutnya peneliti menjelaskan mengenai tujuan dan kegunaan penelitian. Dan peneliti terlebih dahulu mengungkap berbagai hasil penelitian terdahulu yang masih erat kaitannya dengan penelitian yang akan dilakukan, lalu menyusun kerangka pemikiran berupa teori-teori yang dipakai untuk merumuskan hipotesa. Dan dilanjutkan dengan menyusun hipotesis penelitian, yakni jawaban sementara atas persoalan yang hendak dibuktikan kebenarannya lewat penelitian yang akan dilakukan, dan diakhiri dengan merangkai sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Pustaka: dalam bab ini peneliti akan menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti dari

berbagai sumber ilmiah yang telah ada sebelumnya, seperti: pengertian zakat profesi, dasar hukum dari zakat profesi, ruang lingkup zakat profesi, nishab zakat profesi, ditambah dengan materi seputar isu kontroversi hukum zakat profesi di kalangan masyarakat. Dan untuk memperkuat landasan teori, peneliti mencoba mengungkapkan beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran berzakat masyarakat kita.

Bab III. Metode Penelitian: Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitian, berupa: pendekatan dan jenis penelitian, penerapan operasional variabel, sumber data, populasi dan sampel, serta teknik pengumpulan dan analisis data.

Bab IV. Hasil penelitian dan Pembahasan: Pada bab ini peneliti akan menguraikan mengenai hasil penelitian serta pembahasannya mengenai perilaku zakat para dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon dan hubungan mengenai persepsi *muzakki* tentang kontroversi hukum zakat profesi terhadap tingkat kesadaran berzakat para dosen.

Bab V. Penutup: Di akhir penulisan, peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian serta menyampaikan saran.

BAB II

KONTROVERSI HUKUM ZAKAT PROFESI DAN KESADARAN BERZAKAT

A. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat Profesi

Secara bahasa zakat mengandung makna *thaharah* (bersih), pertumbuhan dan berkah.¹ Sedangkan makna zakat menurut istilah adalah bagian tertentu dari harta tertentu yang dibayarkan kepada orang tertentu yang berhak menerimanya sebagai ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT.²

Zakat dibagi menjadi dua macam, yakni zakat *nafs* dan zakat *m l*. Zakat *nafs* adalah zakat jiwa (setiap jiwa umat Islam) yang ditunaikan berkenaan dengan selesainya mengerjakan *shiyam* (puasa) Ramadhan yang difardhukan.³ Sedangkan zakat *m l* adalah zakat yang diwajibkan atas harta yang memenuhi syarat-syarat tertentu.⁴

Berkenaan dengan zakat *m l* yang selalu dinamis, fenomena yang paling menonjol dari dunia perekonomian saat ini adalah semakin kecil keterlibatan langsung sumber daya manusia dalam sektor produksi dan semakin membesarnya sektor jasa. Karena itu, gaji, upah, insentif dan bonus menjadi variabel penting dalam pendapatan manusia modern dan sering kali bernilai kumulatif jauh

¹ Husayn Syahatah, *Akuntansi Zakat*, (Jakarta: Pustaka Progressif, 2004), h. 4

² *Ibid*

³ Hasbi Ash Shiddieqiy, *Pedoman Zakat*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991), h. 30

⁴ Husayn Syahatah, *Akuntansi Zakat*, h. 5

melampaui batas nishab beberapa aset wajib zakat lainnya. Tak heran jika kemudian muncul istilah zakat profesi yang menjadi kajian menarik bagi para ulama dan pakar masa kini.

Menurut Yusuf Qardhawi seperti yang dikutip oleh Nukhtoh Arfawie Kurde bahwa,

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan secara bersama orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nishab (batas minimal untuk berzakat).⁵

Adapun yang menjadi dasar hukum dari zakat profesi adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

⁵ Nukhtoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat & Infaq Profesi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 25

B. Ruang Lingkup Zakat Profesi

Ruang lingkup zakat profesi adalah seluruh pendapatan yang dihasilkan seseorang yang biasanya dalam bentuk gaji, upah, honorarium, dan nama lainnya yang sejenis sepanjang pendapatan tersebut tidak merupakan suatu pengembalian (*yield/return*) dari harta, investasi atau modal. Pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi tertentu (seperti dokter dan pengacara) masuk dalam ruang lingkup zakat ini sepanjang unsur kerja mempunyai peranan yang paling mendasar dalam menghasilkan pendapatan tersebut.⁶

Yusuf Qardhawi dalam pembahasan ini membagi profesi menjadi dua bagian:⁷

1. *Kasb al-amal*, yakni pekerjaan seseorang yang tunduk pada perseroan/perusahaan atau per seorangan dengan mendapatkan upah.
2. *Al-mihan al-hurrah*, yakni pekerjaan bebas tidak terikat pada orang lain, seperti pekerjaan seorang dokter dengan praktek swasta, pemborong, pengacara, notaris, seniman, arsitek, penjahit, tukang kayu dan lain sebagainya.

Berbeda dengan Wahbah Al-Zuhayly yang juga membagi jenis profesi menjadi dua bagian, yakni:⁸

⁶ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 79

⁷ Nukhtoh Arfiwie Kurde, *Memungut Zakat & Infaq Profesi*, h. 25-26

⁸ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Madzhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), h. 275

1. Profesi yang tidak terikat oleh negara, seperti dokter, insinyur, sarjana hukum, penjahit tukang batu, dan pekerjaan wiraswasta lainnya.
2. Profesi yang terikat oleh pemerintah, yayasan dan badan usaha umum atau khusus, yakni yang para pegawainya menerima upah bulanan, seperti pegawai negeri, pekerja, perusahaan dan sejenisnya.

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Yayat Hidayat dalam bukunya *Zakat Profesi: Solusi Dalam Mengentaskan Kemiskinan Ummat*. Menurutnya jenis profesi yang wajib dikeluarkan zakatnya dapat diklasifikasikan ke dalam bentuk sebagai berikut:⁹

1. Zakat atas segala hasil usaha dan pekerjaan (*zakat kasb al-amali wa al-mihan ai-hurrah*) misalnya gaji, honor dan penghasilan lainnya.
2. Zakat atas hasil bangunan, pabrik, industri dan sejenisnya (*zakat al-mustaghillat al-imarat wa al-mashani wa nahwiha*)
3. Zakat atas saham-saham, bursa dan tabungan di bank (*zakat al-shum wa al-sanadat*).

Dengan demikian, contoh-conoh pendapatan yang termasuk ke dalam kategori zakat profesi adalah:¹⁰

- a. Gaji, upah, honorarium dan nama lainnya (*aktif income*) dari pendapatan tetap yang mempunyai kesamaan substansi yang dihasilkan oleh orang dari sebuah

⁹ Yayat Hidayat, *Zakat Profesi: Solusi dalam Mengentaskan Kemiskinan Ummat*, (Cirebon: Pangger Press, 2007), h. 114

¹⁰ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, h. 79-80

unit perekonomian swasta ataupun milik pemerintah. Dalam sebuah negara Islam terminologi pendapatan ini disebut *Al u'tiyaat* (pemberian).

- b. Pendapatan yang dihasilkan dari kerja profesi tertentu (*pasif income*) seperti dokter, akuntan dan lain sebagainya, term pendapatan ini dikenal dalam negara Islam sebagai *Al mal mustafaad*.

C. Nishab, Prosentase dan Perhitungan Zakat Profesi

1. Nishab Zakat Profesi

Nishab menurut *syara'* ialah ukuran yang ditetapkan oleh penentu hukum sebagai tanda untuk wajibnya zakat, baik berupa emas, perak dan lain-lain.¹¹ Mengenai nishab zakat profesi ini, terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, ada yang meng-*qiyas*-kannya dengan zakat emas dan ada pula yang meng-*qiyas*-kan dengan zakat hasil pertanian. Seperti pendapat Muhammad Ghazali yang dikutip oleh Yusuf Qardawi¹², bahwa zakat profesi diukur menurut ukuran tanaman dan buah-buahan. Siapa yang memiliki pendapatan tidak kurang dari pendapatan seorang petani yang wajib mengeluarkan zakat maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya. Namun Yusuf Qardawi sendiri lebih cenderung mengukurnya dengan nishab zakat uang, karena banyak orang yang memperoleh gaji dalam bentuk uang.

¹¹ Nukhtoh Arfiwie Kurde, *Memungut Zakat & Infaq Profesi*, h. 28

¹² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 1991), h. 482

Pendapat lain mengatakan bahwa zakat profesi dapat dianalogikan dengan zakat emas, karena emas adalah standar nilai mata uang dan itulah yang dihasilkan dari hasil kerja profesi¹³. Namun untuk menengahi perbedaan itu, M. Arief Mufraini menerangkan dalam bukunya bahwa *nishab* zakat profesi adalah sebagai berikut:¹⁴

1. Untuk zakat gaji, upah, honorarium dan lainnya (*aktif income*) para ahli fiqh kontemporer berpendapat bahwa *nishab* zakat di-*qiyas*-kan (analogikan) dengan *nishab* kategori aset wajib zakat keuangan yaitu 85 gram emas atau 200 dirham perak dan dengan syarat kepemilikannya telah melampaui kesempurnaan masa haul.
2. Untuk pendapatan hasil kerja profesi lainnya (*pasif income*) para fuqaha berpendapat *nishab* zakatnya dapat di-*qiyas*-kan (analogikan) dengan zakat hasil perkebunan dan pertanian yaitu 750 kg beras (5 *sha'*) dari benih hasil pertanian dan dalam hal ini tidak disyaratkan kepemilikan satu tahun (tidak memerlukan masa haul).

2. Prosentase Volume Zakat Profesi

Prosentase yang dikeluarkan dari pendapatan hasil kerja profesi relatif, dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁵

¹³ Yayat Hidayat, *Zakat Profesi...*, h. 111

¹⁴ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, h. 80-81

¹⁵ *Ibid.*

1. Untuk zakat pendapatan aktif volume prosentase zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari sisa aset simpanan dan telah mencapai nishab pada akhir masa haul.
2. Untuk zakat pendapatan pasif dari hasil kerja profesi prosentase zakat yang dikeluarkan adalah 10% dari hasil total pendapatan kotor atau 5% dari pendapatan bersih.

Namun mayoritas ahli fiqh kontemporer sepakat dan telah ditetapkan oleh lembaga zakat internasional bahwa semakin besar usaha dan tenaga yang dikeluarkan untuk meraih pendapatan maka tarif zakat semakin kecil dan ini terpenuhi dalam zakat profesi yang mana harga zakatnya 2,5%.¹⁶

3. Perhitungan Zakat Profesi

Untuk menghitung besarnya zakat profesi, DR. Husayn Syahatah dalam bukunya *Akuntansi Zakat* membaginya dalam tiga kategori, yaitu:¹⁷

1. Penghitungan Zakat Wiraswasta:

Para ahli kontemporer memasukkan pendapatan dari hasil pekerjaan yang mengandalkan kekuatan fisik dalam zakat profesi dan penghitungannya didasarkan pada asas-asas berikut:

¹⁶ Husayn Syahatah, *Akuntansi Zakat*, h. 190

¹⁷ *Ibid.*, h. 190-196

- a. Tidak wajib zakat atas alat dan sarana untuk melakukan aktivitas kerja, karena ia merupakan barang yang dimiliki bukan untuk dijual yang dibebaskan dari zakat.
- b. Harta zakat terpresentasikan dalam pendapatan yang didapat dari melakukan pekerjaan selama satu haul.
- c. Pendapatan tersebut dikurangi biaya operasional kerja, kebutuhan hidup yang asasi, hutang yang harus dilunasi jika ada dan harga barang-barang yang dibeli, sisanya itulah yang menjadi tempat zakat.
- d. Nishab dihitung berdasar atas nilai 85 gram emas 21 karat.
- e. Tempat zakat dibandingkan dengan nishab, jika tempat zakat tersebut mencapai nishab maka dihitung zakatnya seharga 2,5% jika berdasar tahun Hijriyah dan 2,575% jika berdasar tahun Masehi.
- f. Zakat dihitung dengan cara mengalikan tempat zakat dengan harganya.

2. Penghitungan Zakat Profesional:

Penghasilan dari profesi termasuk penghasilan dari aktivitas kerja yang mana seorang profesional berpegang atas usaha pikiran dalam melakukan aktivitasnya, sedang peranan alat, sarana dan pembantunya adalah kecil.

Hukum zakat aktivitas tersebut diterapkan dalam zakat profesi, yang asas-asasnya teringkas dalam point berikut:

- a. Tidak wajib zakat alat dan sarana yang digunakan dalam pekerjaannya, seperti gedung, perabot, alat rakit, mobil, alat faksimili dan komputer yang ada di kantornya, karena merupakan barang yang dimiliki bukan untuk diperdagangkan.
- b. Wajib zakat atas nilai hasil usaha yang dicapai selama satu haul setelah dikurangi pembiayaan dan hutang.
- c. Biaya yang berkaitan dengan aktivitas pekerjaan, seperti upah pembantu/asisten, sewa, biaya administrasi, pajak, retribusi, iuran anggota asosiasi profesi dan lainnya dikurangkan dari harta wajib zakat.
- d. Begitu juga dikurangkan darinya nafkah dia dan keluarga yang pokok (jika belum dipenuhi dari pendapatannya yang lain), hutang yang harus dilunasi, harga beli peralatan atau cicilan yang harus dibayar tahun tersebut.
- e. Tempat zakat dipresentasikan oleh pemasukan satu tahun dikurangi biaya dan nafkah, hutang dan harga beli alat. Ini pada umumnya merupakan simpanan bersih.
- f. Nishab senilai 85 gram emas 21 karat.
- g. Harga zakat 2,5% jika berdasar tahun Hijriyah dan 2,575% jika berdasar tahun Masehi.
- h. Zakat dihitung dengan mengalikan tempat zakat dengan harganya.

Kita boleh membayar zakat setiap mendapat penghasilan dengan catatan pada akhir haul disamakan antara jumlah yang telah dibayar dengan jumlah yang seharusnya dibayar. Jika ternyata yang telah dibayar lebih banyak dari yang seharusnya maka dianggap shodaqoh dan jika kurang maka harus dipenuhi.

3. Penghitungan Zakat Gaji:

Gaji dan upah termasuk pendapatan yang tunduk kepada zakat profesi dan diterapkan atasnya semua hukum yang telah dijelaskan sebelumnya dari segi haul, nishab dan tarif zakat.

Penghitungan zakat sebagai berikut:

Kondisi pertama: Ada catatan tentang pemasukan, pengeluaran dan hutang yang harus dilunasi. Pada kondisi seperti ini langkah-langkah yang harus diikuti adalah:

- a. Penetapan pemasukan gaji dalam satu tahun.
- b. Dipotong nafkah pokok dan hutang yang dibayar selama satu haul, sisanya merupakan tempat zakat yang dibandingkan dengan nishab.
- c. Menghitung nishab, yaitu 85 gram emas 21 karat.
- d. Jika tempat zakat mencapai nishab maka dihitung zakatnya 2,5%.

Kondisi kedua: Tidak ada catatan dan data keuangan. Pada kondisi seperti ini dihitung simpanan pada akhir haul dan dibandingkan dengan

nishab, jika mencapai nishab maka dihitung zakat sebanyak 2,5% tanpa melihat fluktuasi ditengah haul.

Muzakki boleh membayar zakat gaji secara bulanan dibawah penghitungan zakat gaji, dengan catatan pada akhir haul harus disamakan antara jumlah yang telah dibayar dengan jumlah yang seharusnya dibayar, sebagaimana telah dijelaskan dalam zakat aktivitas profesional.

D. Seputar Kontroversi Hukum Zakat Profesi

Perubahan masyarakat saat ini dari masyarakat agraris primitif dan tradisional menuju masyarakat maju dan modern berjalan begitu cepat. Sistem ekonomi pun bergeser dari pola ekonomi tradisional di pedesaan menuju masyarakat industri yang maju dan modern. Orang-orang mencari nafkah bukan lagi bertani dan beternak, tetapi bergerak dibidang jasa dan pelayanan.

Orang-orang yang bekerja dibidang jasa dan pelayanan banyak yang memperoleh penghasilan (*income*) lebih baik daripada usaha pertanian dan usaha lain yang hasilnya belum tentu. Misalnya seperti pejabat tinggi negara, pimpinan partai politik, pegawai negeri, pegawai perusahaan, perbankan, penerbangan, angkutan umum, transportasi, telkom dan sebagainya, mereka memperoleh penghasilan secara rutin yang cukup besar pada setiap bulannya. Atau seorang pegawai profesional yang memberikan pelayanan tanpa terikat oleh kontrak dan waktu seperti dokter praktek, pengacara, konsultan, kontraktor, seniman dan

sebagainya yang memperoleh bayaran atau imbalan jasa yang besar pada setiap kegiatan. Semua usaha ini umumnya lebih menjanjikan kesejahteraan dibandingkan dengan kerja-kerja tradisional yang sekarang sudah mulai tidak diminati orang.

Inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan apakah mereka diwajibkan membayar zakat, sementara para petani tradisional yang penghasilannya relatif kecil dibebani kewajiban zakat? Ada beberapa pandangan ulama dalam masalah ini baik dari kalangan *shahabat* maupun *tabi'in* sebagai berikut:¹⁸

1. Ulama yang mewajibkan zakat profesi:

- a. Ibnu Hazm menjelaskan bahwa telah sah riwayat dari Ibnu Abbas bahwa beliau mewajibkan zakat pada setiap harta yang wajib dizakati pada waktu dimiliki oleh seorang muslim.
- b. Abu Ubaid meriwayatkan dari Hubairah bin Yarim bahwa Abdullah Ibnu Mas'ud memungut zakat gaji prajurit (*al-'atha*) yang terjadi dalam beberapa peperangan kecil.
- c. Imam Malik meriwayatkan dari Ibnu Syihab bahwa orang yang pertama memungut zakat dari gaji (*al-'athiyah*) adalah Mu'awiyah Bin Abi Sufyan.

Dalam riwayat Abu Ubaid bahwa Mu'awiyah apabila menyerahkan gaji pegawainya diambil zakatnya. Demikian pula apabila membagi-bagikan harta

¹⁸ M. Yazid, *Zakat Kasb Al-'Amal Wa Al-Mihan Al-Hurrah*, 2009, <http://tanbihun.com/fikih/bahsul-masail/zakat-profesi/> Diakses pada 11 Juli 2010

terlantar yang dikuasai oleh negara (*radd al-madzalim*) kepada masyarakat dipungut zakatnya juga. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bahwa Umar Bin Abdul Aziz (Khalifah Al-Rasyidin ke lima) selalu mengeluarkan zakat dari gaji (*al-atha*) dan honorarium (*al-ja'izah*). Bahkan sampai kepada honor dan hadiah yang diberikan kepada delegasi sebagai imbalan jasa atau suatu prestasi dipungut zakatnya.

Ulama tabi'in yang lain yang memandang wajib mengeluarkan zakat dari gaji dan pendapatan lainnya (*al-mal al-mustafad*) ialah Az-Zuhri, Al-Hasan Makhul dan Al-Auza'ie.

2. Ulama yang tidak mewajibkan zakat profesi:

- a. Imam Malik meriwayatkan dari Muhammad bin Uqbah bahwa dia bertanya kepada Qasim bin Muhammad tentang seorang budak yang membebaskan diri dengan membayar sejumlah uang, apakah harus membayar zakatnya? Qasim menjawab bahwa Abu Bakar Al-Shiddiq tidak memungut zakat dari harta kecuali jika mencapai haul. Qasim memberikan penjelasan bahwa Abu Bakar apabila membayar gaji pegawai bertanya kepada mereka apakah mereka mempunyai harta lain yang wajib dizakati? apabila mereka menjawab punya, maka beliau langsung memungut zakat harta itu, dan apabila menjawab tidak mempunyai, maka beliau menyalurkan gajinya tanpa dipungut apapun.

- b. Imam Malik meriwayatkan dari Umar bin Husain, dari Aisyah binti Qudamah, dari bapaknya bahwa bapaknya (Qudamah) menerangkan: apabila aku datang menghadap Utsman bin Affan untuk mengambil gaji beliau bertanya kepadaku: apakah kamu mempunyai harta yang lain yang wajib dizakati? Apabila aku menjawab ya, maka zakatnya dipungut langsung dari harta itu, tetapi apabila aku menjawab tidak, maka gajinya diserahkan kepadaku.
- c. Ibnu Hazm menjelaskan bahwa Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan zakat hasil profesi (*al-maal al-mustafad*) kecuali jika mencapai haul.
- d. Imam Malik menegaskan bahwa harta hasil profesi tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali apabila mencapai haul, baik yang bersangkutan mempunyai harta lain yang sejenis yang wajib dizakati atau tidak. Demikian pula pendapat Imam Asy-Syafi'i.

Maraknya kontroversi yang terjadi di kalangan ulama tersebut tak jarang menjadi perbincangan menarik bagi masyarakat kita hingga kini. Berikut peneliti sajikan beberapa alasan dari mereka yang mendukung diwajibkannya hukum mengeluarkan zakat profesi dan juga dari mereka yang tidak mendukung diwajibkannya hukum mengeluarkan zakat profesi:

- 1. Alasan yang menguatkan pentingnya zakat profesi:
 - a. Profesi dimasa Rasulullah saw. itu berbeda hakikatnya dengan profesi dimasa kini. Sebab sebenarnya yang terkena zakat itu pada hakikatnya

bukan karena dia berprofesi apa atau berdagang apa, tetapi apakah seseorang sudah masuk dalam kategori orang kaya atau tidak.¹⁹

- b. Di masa Rasulullah saw. ada beberapa jenis profesi, namun mereka tidaklah termasuk orang kaya dan penghasilan mereka tidak besar. Maka oleh Rasulullah saw. mereka pun tidak dipungut zakat.²⁰
- c. Yang kita sebut profesional di masa kita hidup ini bisa jadi orang yang sangat kaya dan teramat kaya. Jauh melebihi kekayaan petani dan peternak. Bahkan di negeri kita ini, yang namanya petani dan peternak itu sudah bisa dipastikan miskin, sebab mereka tertindas oleh sistem yang tidak berpihak kepada mereka.²¹
- d. Pada hakikatnya harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan yang menurut kebiasaan dapat dimanfaatkan (dalam hal ini termasuk upah dan honorarium). Maka tidaklah logis bila hanya harta yang disebut-sebut nabi di masa beliau saja yang perlu dikeluarkan zakatnya.²²
- e. *Qiyas* akan tetap berlaku dalam hukum Islam, dan penerapan sesuatu yang mewajibkan *qiyas* ('*illah*) tetap berlangsung dari waktu ke waktu. Maka dapat dikemukakan bahwa segala bentuk kekayaan yang memenuhi kriteria

¹⁹ Abisyakir, *Kontroversi Hukum "Zakat Profesi"*, 2008, <http://abisyakir.wordpress.com/2008/09/19/kontroversi-hukum-zakat-profesi/>. Diakses pada 19 Februari 2010

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

²² M. Quraish Shihab, *Fatwa-fatwa Quraish Shihab: Seputar Ibadah Mahdah*, (Bandung: Mizan, 1999), h. 168

berkembang dan syarat-syarat yang telah disebutkan para ulama fiqh, wajib untuk dizakati.²³

2. Alasan yang tidak menguatkan pentingnya zakat profesi:

- a. Menanggapi makna dari surat Al-Baqarah ayat 267. Ayat tersebut sebenarnya umum, memerintahkan kaum muslimin menunaikan infaq (belanja) di berbagai jalan kebaikan, misal untuk keluarga, untuk pendidikan, untuk syiar Islam, untuk dakwah, untuk jihad dan lain sebagainya. Itu perintah umum, maka jangan ditarik ke arah kewajibanzakat. Zakat itu istilah khusus, sudah paten, sudah jelas kadar, bentuk dan sasarannya.²⁴
- b. Dalam masalah ibadah, kita harus mengikuti dalil yang jelas dan shahih. Dengan demikian maka tidak perlu dibantah dengan argument tersebut karena Allah memiliki hikmah tersendiri dari hukum-hukumNya.²⁵
- c. Keharusan membersihkan harta bagi orang kaya, itu wajib. Bentuknya fleksibel, bisa infaq, shodaqoh, hibah, wakaf, hadiah dan sebagainya. Itu wajib sebagai amanah Al-Qur'an dan Sunnah. Namun namanya bukan zakat, sebab zakat itu sudah permanen tidak bisa diutak-atik lagi.²⁶
- d. Gaji bukanlah suatu hal yang baru pada zaman sekarang, namun sudah ada pada zaman nabi, para sahabat dan ulama-ulama terdahulu. Namun tidak

²³ Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1995), h. 123

²⁴ Abisyakir, *Kontroversi Hukum "Zakat Profesi"*

²⁵ Apriansyah, *Kontroversi Zakat Profesi*, 2009,

<http://www.facebook.com/topic.php?uid=50167786247&topic=11301> Diakses pada 19 Februari 2010

²⁶ Abisyakir, *Kontroversi Hukum "Zakat Profesi"*

pernah didengar dari mereka kewajiban zakat profesi seperti yang dipahami oleh orang-orang sekarang.²⁷

- e. Dalam zakat profesi terdapat unsur kedzaliman terhadap pemilik gaji, karena sekalipun gajinya mencapai *nishab*, namun kebutuhan orang itu berbeda-beda tempat dan waktunya. Selain itu juga, kita tidak mengetahui masa yang akan datang kalau dia dipecat, atau rezekinya berubah.²⁸

Menanggapi maraknya kontroversi tersebut, ulama kontemporer seperti Abdurrahman Hasan, Muhammad Abu Zahrah, Abdul Wahab Khalaf, Wahbah Al-Zuhayli dan Yusuf Qardawi telah mengadakan penelitian dan memunaskan argumen-argumen (adillah) yang dikemukakan oleh kedua belah pihak (pihak ulama yang mewajibkan zakat profesi dan pihak ulama yang tidak mewajibkan). Dalam kesimpulannya mereka memilih pendapat yang mewajibkan zakat hasil profesi, dengan alasan:²⁹

1. Ulama *shahabat* dan *tabi'in* telah berbeda pendapat mengenai zakat hasil profesi (*al-maal al-mustafad*), sebagian mereka mensyaratkan adanya haul dan sebagian lagi tidak mensyaratkannya, tetapi langsung dikeluarkan zakatnya pada saat diperolehnya. Jika terjadi demikian maka tidak ada pendapat yang satu lebih utama dari yang lain sehingga tidak ada yang mengharuskan berpegang pada salah satunya sehingga permasalahannya

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ M. Yazid, *Zakat Kasb Al-'Amal Wa Al-Mihan Al-Hurrah*

dikembalikan kepada otoritas *nash*: “*Apabila kamu berselisih maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur’an) dan RasulNya (Al-Hadits)*).

2. Kalangan ulama yang tidak mensyaratkan haul adalah lebih dekat kepada pengertian umum *nash* dan kemutlakannya, karena *nash-nash* yang menunjuk pada kewajiban zakat berlaku umum dan mutlak.
3. Apabila *nash-nash* yang menunjuk pada kewajiban zakat berlaku secara umum dan mutlak, maka hasil profesi termasuk di dalamnya.
4. Mensyaratkan adanya haul pada zakat profesi akan membebaskan kewajiban zakat kepada sebagian besar pegawai tinggi dan para profesional yang mendapatkan *income* sangat besar. Karena bisa saja hasilnya habis digunakan untuk membiayai hidup mewah dan berfoya-foya. Dengan demikian beban zakat hanya ditanggung oleh pekerja-pekerja menengah ke bawah yang hemat dan rajin untuk menabung.
5. Pendapat yang mensyaratkan adanya haul pada zakat profesi berimplikasi pada ketidakadilan dalam pembebanan zakat. Karena seorang petani yang bekerja menggarap sawahnya berbulan-bulan ketika memperoleh hasil sebanyak 5 *wasaq* (lebih kurang 12 kwintal gabah atau 7,20 kwintal beras bernilai sekitar Rp. 1.800.000,-) dikenakan beban zakat 5-10 %, sementara para pejabat tinggi dan pemimpin perusahaan atau pekerja-pekerja profesional yang mendapatkan uang (*income*) sangat besar tidak dikenakan zakat.

E. Kesadaran Berzakat

Sadar berarti: merasa; tahu; mengerti; ingat kembali;. Sedangkan arti kesadaran ialah: keinsafan; keadaan mengerti; hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran hukum berarti: kesadaran seseorang akan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada; kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum.³⁰

Dalam pandangan para yuris muslim, ziswaf (zakat, infak, shodaqoh dan wakaf), terutama zakat merupakan ajaran yang melandasi tumbuh dan berkembangnya sebuah kekuatan sosial ekonomi umat Islam. Seperti pada empat rukun Islam yang lain, ajaran zakat menyimpan beberapa dimensi yang kompleks meliputi nilai privat-publik, vertiaki-horizantal, serta ukhrawi-duniawi. Nilai-nilai tersebut merupakan landasan pengembangan kehidupan kemasyarakatan yang bersifat komprehensif. Bila semua dimensi yang terkandung dalam ajaran zakat ini dapat diaktualisasikan, maka zakat akan menjadi sumber kekuatan yang sangat luar biasa bagi pengembangan umat menuju kebangkitan kembali peradaban Islam yang beberapa abad mengalami masa suram.

Namun dalam perjalanan sejarah masyarakat Islam, ajaran zakat dengan berbagai dimensi yang dimiliki, sepertinya luput dari perhatian umat Islam. Zakat tinggal menjadi kewajiban pribadi umat Islam dan dilakukan dalam upaya melaksanakan kewajiban diri terhadap Allah semata-mata. Zakat sekedar menjadi

³⁰ *Google Translate Indonesian To Indonesian*, <http://artikata.com/arti-348508-sadar.php>. Diakses pada 29 September 2010

apa yang disebut sebagai ibadah *mahdah*, *privacy* dan bernuansa orang per orang. Dalam arti kata lain, telah terjadi suatu pergeseran makna, dari suatu ajaran yang luas dan mendalam, yang dikembangkan Rasul dan shahabat, pada akhirnya zakat menjadi ajaran yang sempit bersamaan dengan mundurnya umat Islam dan menurunnya kemauan berpikir.

Dalam kaitannya dengan ini, menurut Robbins (1996) yang dikutip oleh Dadang Hylman Nadjat dalam penelitiannya, bahwa perilaku individu dipengaruhi antara lain oleh persepsi, sikap, kepribadian dan motivasi. Oleh karena itu perilaku *muzakki* dalam berzakat pun dipengaruhi oleh:³¹

1. Persepsi: zakat *m l* merupakan rukun kemasyarakatan dan bukan urusan pemerintah, penggunaan harta harus sesuai dengan ketentuan agama, zakat sama pentingnya dengan shalat, serta zakat lebih baik diserahkan ke pengelola zakat.
2. Sikap: Basis pemerintah belum profesional, Basis non pemerintah sudah profesional, amilin zakat cukup profesional, ahli zakat sebagai acuan pelaksanaan zakat, serta kemudahan mendatangi tempat Basis.
3. Kepribadian: taat menunaikan perintah agama, tidak peduli orang lain dalam berzakat dan berpikir positif dalam memahami agama.

³¹ Dadang Hylman Nadjat, *Identifikasi Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Muzakki Dalam Mengeluarkan Zakat Maal Melalui Lembaga Pengelola Zakat di Kota Bandung*, 2001, <http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptitbpp-gdl-dadanghilm-32337>. Diakses pada 29 September 2010

4. Motivasi: hidup tenang, tentram dan dirahmati Allah SWT, upaya pengentasan kemiskinan, serta selamat dari hukuman dunia akhirat.
5. Kadar religiusitas: keyakinan adanya pertolongan Allah SWT dan rutin memperdalam ajaran agama Islam.

Selain itu, Muhammad Quraish Shihab mengungkapkan bahwa paling tidak ada tiga alasan yang dapat dikemukakan untuk menggambarkan landasan filosofis kewajiban zakat:³²

Pertama, *Istikhlaf* atau penugasan khalifah di bumi. Allah SWT adalah pemilik seluruh alam raya dan segala isinya, termasuk pemilik harta benda. Seseorang yang beruntung memperolehnya pada hakikatnya hanya menerima titipan sebagai amanat untuk disalurkan dan dibelanjakan sesuai dengan kehendak pemiliknya. Manusia yang dianugerahi amanat itu, dengan demikian, berkewajiban memenuhi ketetapan-ketetapan yang digariskan oleh Sang Pemilik, baik dalam pengembangan harta, maupun dalam penggunaannya.

Kedua, solidaritas sosial. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia tidak dapat hidup tanpa masyarakatnya. Sekian banyak pengetahuan diperolehnya melalui masyarakat, seperti bahasa, adat istiadat, norma-norma, sopan santun dan sebagainya. Demikian halnya dalam bidang material, betapapun seseorang memiliki kepandaian, namun hasil-hasil material yang diperolehnya adalah berkat bantuan dari pihak-pihak lain, baik langsung ataupun tidak langsung. Hingga titik ini maka kedudukan manusia tak lain hanya sekedar pengelola. Sang Pencipta dan

³² *Ibid.*

Pemilik segala sesuatu adalah kembali kepada Tuhan. Dengan demikian, wajar jika Allah memerintahkan untuk mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang diamanatkanNya kepada seseorang itu demi kepentingan orang lain yang membutuhkannya.

Ketiga, persaudaraan. Manusia berasal dari suatu keturunan yang sama (Adam), dan oleh karenanya antara seseorang dengan yang lainnya terdapat pertalian darah, dekat atau jauh. Pertalian darah tersebut akan lebih kokoh dengan persamaan-persamaan lain seperti agama, kebangsaan, lokasi domosili dan sebagainya. Disadari bersama, bahwa hubungan persaudaraan menuntut bukan sekedar hubungan *take and give* (memberi dan menerima), atau pertukaran manfaat, tetapi lebih dari itu, yakni memberi tanpa menanti imbalan atau membantu tanpa perlu diminta bantuan. Kebersamaan dan persaudaraan inilah yang mengantarkan kepada kesadaran menyisihkan sebagian harta kekayaan, khususnya kepada mereka yang butuh, baik dalam bentuk kewajiban zakat maupun sedekah dan infak.

Namun demikian, semua ketentuan normatif keagamaan, apapun bentuknya, hanya akan menjadi selogan usang atau bahkan fosil-fosil tua jika tidak diiringi dengan kesadaran dan kemauan menjalankan dari umatnya secara sungguh-sungguh dan tanggung jawab.

Menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jabar Hafidz Utsman, kurangnya kesadaran muzakki untuk berzakat berawal dari ketidaktahuan mereka

tentang makna ibadah tersebut.³³ Sesungguhnya setiap harta yang dimiliki secara pribadi dan bersama harus dibersihkan nilainya lewat zakat dalam kurun waktu tertentu. Zakat meliputi harta perniagaan, pertanian, perdagangan, penghasilan, termasuk makanan yang kita makan.

Sementara itu, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. Dr. H. Nanat Fatah Natsir, M.S. memandang rendahnya kesadaran umat dalam membayar zakat hanya masalah lemahnya kepercayaan terhadap LAZ dan BAZ³⁴. Masih banyak masyarakat yang khawatir zakatnya tidak akan sampai ke tangan orang yang membutuhkan. Maka mereka pun mengambil langkah dengan memberikan zakat secara langsung kepada *mustahiq* tanpa memperhitungkan aspek konsumtifnya.

Dalam kondisi masih rendahnya kesadaran umat untuk membayar zakat, maka diperlukan langkah-langkah serius dan sistematis. Hal ini antara lain bisa ditampuh dengan merubah perlakuan kita terhadap zakat dengan mencontoh shalat.³⁵

Pertama, jika shalat sudah diperkenalkan dan diajarkan sejak usia dini, maka zakat pun juga harus diajarkan sejak kecil. Anak-anak perlu dilatih dan

³³ Ahmad Tholabi Kharlie, *Kesadaran Rendah Kepercayaan Lemah*, 2009, <http://klipingut.wordpress.com/2009/11/30/kesadaran-rendah-kepercayaan-lemah/>, Diakses pada 11 Oktober 2010

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Moch. Arif Budiman, *Mari Zakat Berjamaah*, 2010, <http://suarapembaca.detik.com/read/2009/09/15/115709/1203808/471/zakah-berjamaah>, Diakses pada 10 Januari 2010

dibiasakan menyantuni fakir miskin dengan menyisihkan uang saku atau merelakan sebagian makanan atau pakaian mereka.

Kedua, pengumpulan zakat perlu diupayakan secara berjamaah dan bukannya dilakukan secara sendiri-sendiri oleh yang bersangkutan. Jadi bukan hanya shalat yang dianjurkan berjamaah, zakat pun seharusnya juga demikian. Artinya, zakat harus dikelola oleh badan/lembaga tertentu, baik yang dikoordinir oleh pemerintah (Badan Amil Zakat/BAZ) maupun oleh masyarakat (Lembaga Amil Zakat/LAZ), yang bertanggung jawab terhadap pengumpulan, pendayagunaan dan pendistribusian zakat di daerah tersebut.

Ketiga, perlunya peningkatan frekuensi zakat sehingga tidak terkonsentrasi hanya pada bulan Ramadhan saja, sebab masa perhitungan zakat tidak selamanya beriringan dengan datangnya bulan suci tersebut. Penundaan zakat hanya untuk menunggu Ramadhan atau apalagi tidak membayarkannya sama sekali adalah kedzaliman terhadap para *mustahiq*.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yakni bersifat meluas, proses penelitian kuantitatif dimulai dengan adanya suatu masalah yang diteliti dan diangkat kepermukaan dengan maksud untuk menggeneralisir.¹ Sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian dasar (*basic research*), yakni pencarian terhadap sesuatu karena ada perhatian dan keingintahuan terhadap hasil suatu aktivitas.²

Adapun penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif survey, bahwa peneliti tidak hanya menggambarkan dan menjelaskan fakta-fakta empiris yang ditemui di lapangan, tetapi menganalisis pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya.

B. Penerapan Operasional Variabel

Berdasarkan judul dari penelitian ini yaitu *Persepsi Muzakki tentang Kontroversi Hukum Zakat Profesi dan Pengaruhnya terhadap Tingkat Kesadaran Berzakat (Survey pada Dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon)*. Maka variabel yang dapat diungkap dalam penelitian ini adalah:

¹ Toto Syatori Nasehuddin, *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*, (Cirebon: STAIN, 2008), h.23

² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h.29

- a. Persepsi *muzakki* tentang kontroversi hukum zakat profesi, yang merupakan variabel yang memerani (independent variabel, X).
- b. Tingkat kesadaran berzakat, yang merupakan variabel yang diperani (dependent variabel, Y).

Selanjutnya operasionalisasi variabel penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Operasionalisasi Variabel Penelitian

variabel	Definisi	Indikator	Sub Indikator	Skala	Nomor Item Angket
Variabel X Persepsi <i>Muzakki</i> tentang Kontroversi Hukum Zakat Profesi	– Persepsi adalah pengamatan;	– Tanggapan tentang	– Seluruh harta	Ordinal	1
	hal mengetahui, melalui indera;	perbedaan pendapat mengenai	– Sebagian harta		2
	tanggapan (indera); daya memahami. ³	jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.			
	– <i>Muzakki</i> ialah yang membayar zakat;	– Tanggapan tentang perbedaan pendapat mengenai	– Keberadaan zakat profesi		3
	pembayar zakat. ⁴		– Sifat zakat profesi		4&5
	– Kontroversi adalah perbedaan				

³ Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer*, (Gita Media Press, 2006), h.370

⁴ *Ibid.*, h.330

	pendapat; perdebatan; perselisihan. ⁵	eksistensi zakat profesi.			
	– Hukum ialah undang-undang peraturan dan sebagainya untuk mengatur kehidupan masyarakat. ⁶	– Tanggapan tentang adanya perbedaan memaknai sumber hukum zakat.	– Al-qur'an – Sunah – Ijtihad		6 7 8
	– Zakat profesi ialah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu yang mendatangkan penghasilan yang memenuhi nishab. ⁷	– Tanggapan tentang perbedaan pendapat mengenai jenis profesi yang wajib dikeluarkan zakatnya.	– Syarat profsi – Penghasilan		10 9&11
	– Jadi dapat disimpulkan bahwa persepsi muzakki tentang	– Tanggapan tentang perbedaan	– Hukum – Nishab – Haul		12 13 14

⁵ *Ibid.*, h.264

⁶ Google Translate Indonesian to Indonesian, <http://artikata.com/arti-348508-sadar.php>, Diakses pada 29 September 2010

⁷ Nukhtoh Arfawie Kurde, *Memungut Zakat dan Infaq Profesi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h.25

	kontroversi hukum zakat profesi adalah tanggapan orang yang membayar zakat tentang perbedaan pendapat mengenai peraturan diwajibkannya zakat bagi tiap pekerjaan atau keahlian professional tertentu.	pendapat mengenai hukum dan ketentuan lain zakat profesi.	– Prosentase		15
Variabel Y Tingkat Kesadaran Berzakat	<ul style="list-style-type: none"> – Kesadaran ialah keinsafan; keadaan mengerti; hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang.⁸ – Berzakat berasal dari kata zakat yang 	<ul style="list-style-type: none"> – Respon terhadap munculnya kontroversi zakat profesi. – Sikap terhadap zakat profesi. 	<ul style="list-style-type: none"> – Kesadaran hukum – Upaya memahami – Alternatif solusi – Kepedulian terhadap kontroversi – Pro/kontra 	Ordinal	1,2&3 7 12&13 4&15 5

⁸ Google Translate Indonesian to Indonesian

	berarti <i>thaharah</i> (bersih); pertumbuhan dan berkah. ⁹ – Jadi kesadaran berzakat dapat diartikan sebagai penilaian terhadap keinsafan atau pengertian seseorang untuk membersihkan dan menumbuhkan hartanya.	– Perilaku zakat profesi.	zakat profesi – Pemenuhan kewajiban zakat – Kepatuhan mengikuti syarat dan ketentuan zakat	6&14 8,9,10& 11
--	--	---------------------------------	--	-----------------------

C. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data-data yang peneliti dapatkan langsung dari para dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

⁹ Husayn Syahatah, *Akuntansi Zakat*, (Jakarta: Pustaka Progressif, 2004), h.4

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber data kedua atau sumber sekunder dari data yang kita butuhkan. Dan dalam penelitian kali ini yang menjadi data sekunder adalah data-data yang peneliti dapatkan dari berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

D. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan valid, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Kuesioner/Angket

Kuesioner atau angket merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, kemudian dikirim untuk diisi oleh responden.¹⁰

Metode kuesioner ini peneliti gunakan untuk mencari data mengenai persepsi *muzakki* terhadap maraknya kontroversi hukum zakat profesi yang terjadi di kalangan ulama. Semakin baik persepsi mereka terhadap zakat profesi (mendukung zakat profesi), maka akan semakin kecil pengaruh yang ditimbulkan terhadap tingkat kesadaran berzakat *muzakki*.

¹⁰ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h.123

Adapun untuk pengolahan data angket, penulis berpedoman pada tabel

Skala Likert berikut:

Tabel 3.2

Pedoman Nilai/Skor Angket

Variabel	Alternatif Jawaban	Skor
X	Sangat Setuju (SS)	5
	Setuju (S)	4
	Ragu-ragu (R)	3
	Tidak Setuju (TS)	2
	Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Y	Sanagt Setuju (SS)	5
	Setuju (S)	4
	Ragu-ragu (R)	3
	Tidak Setuju (TS)	2
	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

2. Wawancara

Wawancara atau *interview* adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai.¹¹

Dalam hal ini peneliti mencoba mewawancarai beberapa orang responden (dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon) untuk melengkapi data-data yang tidak bisa peneliti dapatkan lewat metode kuesioner.

¹¹ *Ibid*, h.126

3. Telaah dokumen

Telaah dokumen merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencari hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.¹²

Dalam hal ini peneliti akan mengadakan pengamatan langsung terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian yang sedang diamati.

E. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan dari apa yang menjadi objek penelitian, sedangkan sampel adalah sebagian dari individu yang menjadi objek penelitian yang mewakili jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi.¹³

Dikarenakan jumlah populasi yang cukup banyak dalam penelitian ini, yakni keseluruhan dari jumlah dosen yang terdaftar di kampus IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan berbagai pangkat dan golongan, yang berdasarkan hasil survey berjumlah 234 orang, maka peneliti mencoba mengambil sampel sebanyak 10% dari keseluruhan jumlah populasi yang ada, yang berdasarkan perhitungan jumlahnya sekitar 23 atau 24 orang, kemudian penelitian genapkan menjadi 25 orang dosen.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996), h.234

¹³ *Ibid.*, h.115

F. Uji Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kuantitatif kriteria utama terhadap data hasil penelitian adalah valid, reliabel dan objektif. Oleh karena itu benar tidaknya data sangat menentukan bermutu tidaknya hasil penelitian. Sedangkan benar atau tidaknya data tergantung dari baik tidaknya instrumen pengumpul data. Instrumen yang baik harus memenuhi dua persyaratan penting yaitu valid dan reliabel.

1. Uji Validitas

Sebuah instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur sesuatu dengan tepat apa yang hendak diukur. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila dapat mengungkap data dari variabel yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud.

Menurut Suharsimi Arikunto¹⁴ yang dimaksud validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Suatu instrumen yang sah atau valid mempunyai tingkat validitas yang tinggi, sebaliknya instrumen yang kurang valid berarti mempunyai validitas rendah.

Adapun langkah-langkah pengujian instrumen validitas sebagai berikut:

- a. Penulis memberikan skor pada setiap pertanyaan baik untuk variabel X maupun variabel Y dari masing-masing responden.

¹⁴*Ibid.*, 158

- b. Menghitung skor total dari masing-masing pertanyaan (ΣX), skor total dari masing-masing responden (ΣY), skor total dari masing-masing item pertanyaan setelah dikuadratkan (ΣX^2), menghitung skor total dari masing-masing responden setelah dikuadratkan (ΣY^2), dan skor total dari hasil perkalian dari setiap item pertanyaan tiap-tiap responden dengan skor total masing-masing responden (ΣXY).
- c. Setelah dilakukan perhitungan untuk tiap-tiap item pertanyaan variabel X dan variabel Y, maka dimasukan kedalam rumus korelasi *product moment*.
- d. Setelah memperoleh nilai koefisien korelasi, langkah selanjutnya adalah mengkonsultasikan ke tabel harga kritis *product moment*.

$$r_{xy} = \frac{n \Sigma XY - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{\{n(\Sigma X^2) - (\Sigma X)^2\} \{n(\Sigma Y^2) - (\Sigma Y)^2\}}}$$

2. Uji Reliabilitas

Setelah melakukan uji validitas, langkah selanjutnya adalah melakukan uji reliabilitas, agar instrumen dapat dipercaya. Instrumen yang dikatakan reabel adalah instrumen yang apabila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama

Rumus yang digunakan dalam pengujian reliabilitas adalah internal consistensi melalui teknik belah dua (split half). Pengujian reliabilitas dengan

teknik ini, dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas instrumen. Langkah-langkah dalam uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

- a. Membelah instrumen menjadi dua kelompok, yaitu kelompok genap dan kelompok ganjil untuk masing-masing variabel.
- b. Menghitung skor total instrumen ganjil (X), menghitung skor total instrumen genap (Y), menghitung skor total instrumen ganjil yang dikuadratkan (X²), menghitung skor total genap yang dikuadratkan (Y²), menghitung skor total dari hasil perkalian instrumen ganjil dan genap (XY). Setelah dilakukan perhitungan, kemudian dimasukkan ke dalam korelasi product moment.

$$r_{xy} = \frac{n \Sigma XY - (\Sigma X)(\Sigma Y)}{\sqrt{\{n(\Sigma X^2) - (\Sigma X)^2\} \{n(\Sigma Y^2) - (\Sigma Y)^2\}}}$$

- c. Untuk memperoleh nilai koefisien korelasi, penulis menggunakan rumus *Spearman Brown*.

$$r_i = \frac{2 \times r_b}{1 + r_b}$$

Dimana:

r_i = Reliabilitas internal seluruh instrument

r_b = Korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua

G. Pengolahan dan Analisis Data

Dalam proses pengolahan data, dimulai dengan tahap editing dan klasifikasi data. Editing data dimaksudkan untuk mengetahui benar tidaknya data yang terkumpul, sedangkan klasifikasi data dimaksudkan untuk memilah dan memilih data sehingga memudahkan dalam melakukan analisis.

Kegiatan selanjutnya adalah menganalisis data dengan cara menghubungkan data-data tersebut yang diperoleh dari berbagai sumber data, untuk memprediksi seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan variable bebas (X) terhadap variable tak bebas (Y), dalam hal ini penulis menggunakan data statistika sebagai berikut:

a. Analisis Korelasi *Spearman Rank*

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui derajat hubungan atau pengaruh antara satu variable dengan variable lainnya, yaitu antara variable X (persepsi muzakki tentang kontroversi hukum zakat profesi) dengan variable Y (tingkat kesadaran berzakat). Dan untuk menghitung koefisien korelasi ini menggunakan rumus sebagai berikut:

$$r = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

Dimana:

(rho) : Koefisien korelasi

d_i^2 : Jumlah kuadrat dari selisih rank variable x dan variable Y

n : Banyaknya ukuran sampel

1 : Bilangan konstanta

6 : Bilangan konstanta

Dari perhitungan tersebut akan diketahui besarnya koefisien untuk dapat memberikan interpretasi terhadap kuat atau tidaknya hubungan dari koefisien tersebut, maka dapat brpedoman pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Tabel Interpretasi Hubungan

Kategori Jawaban	Skor
Antara 0,800 sampai dengan 1,000	Tinggi
Antara 0,600 sampai dengan 0,800	Cukup
Antara 0,400 sampai dengan 0,600	Agak Rendah
Antara 0,200 sampai dengan 0,400	Rendah
Antara 0,000 sampai dengan 0,200	Sangat Rendah

b. Analisis Koefisien Regresi

Untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan variabel X terhadap variabel Y digunakan analisis regresi. Peneliti menggambarkan persepsi *muzakki* tentang kontroversi hukum zakat profesi pada ordinat X dan kesadaran berzakat pada ordinat Y. Jika ditarik garis lurus, inilah yang disebut dengan garis regresi.

Persamaan $Y = a + bX$, menggambarkan hubungan linier Y dengan X. Berdasarkan persamaan tersebut, jika diketahui nilai X dan Y, maka estimasi nilai a dan b dengan mudah dapat ditentukan.

Regresi yang digunakan adalah regresi sederhana, yang mana perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Adapun nilai a didapat dari:

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n(\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

Dan nilai b didapat dari:

$$b = \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n(\sum X^2) - (\sum X)^2}$$

c. Analisis Koefisien Determinasi/Penentu

Analisis koefisien determinasi/penentu merupakan koefisien korelasi yang digunakan untuk mengetahui prosentase pengaruh yang terjadi dari

variable bebas terhadap variable tak bebas dengan asumsi $0 < \rho < 1$, rumus statistika yang digunakan sebagai berikut:

$$KD = \rho^2 \times 100 \%$$

Dimana:

KD : Nilai koefisien determinasi/penentu

(*rho*) : Nilai koefisien korelasi

d. Uji Statistika bagi Koefisien Korelasi

Uji statistika bagi koefisien korelasi menggunakan rumus sebagai berikut:

$$t = \rho \sqrt{\frac{n - 2}{1 - \rho^2}}$$

Dimana pengambilan keputusan diterima atau ditolaknya dalam analisis ini ditulis sebagai berikut:

- a. H_0 : Artinya tidak terdapat pengaruh antara persepsi *muzakki* tentang kontroversi hukum zakat profesi terhadap tingkat kesadaran berzakat.
- b. H_a : Artinya terdapat pengaruh antara persepsi *muzakki* tentang kontroversi hukum zakat profesi terhadap tingkat kesadaran berzakat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Persepsi Muzakki tentang Kontroversi Hukum Zakat Profesi

Isu mengenai adanya kontroversi hukum zakat profesi yang masih menjadi perbincangan hangat masyarakat kita hingga kini, rupanya juga cukup menarik perhatian para *muzakki*. Dan setelah melakukan penelitian, peneliti mendapatkan gambaran mengenai persepsi *muzakki* tentang adanya kontroversi tersebut.

Menurut para *muzakki* yang menjadi objek dalam penelitian ini (dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon), faktor utama yang menyebabkan terjadinya kontroversi tersebut adalah tidak adanya *nash* yang jelas yang dapat dijadikan pegangan wajibnya hukum zakat profesi.

Karena zakat profesi merupakan salah satu aspek zakat yang baru dikenal di era modern, maka wajar jika kemudian muncul anggapan bahwa Al-Qur'an dan sunnah tidak pernah memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi. Menanggapi hal ini, salah satu responden menegaskan bahwa faktor tersebut muncul akibat masyarakat muslim kita saat ini masih memahami ajaran agama sebatas tekstual saja. Ia menambahkan

pula bahwa sebenarnya zakat profesi telah ada pada zaman *tabi'in*, hanya saja jenis profesinya yang berbeda.¹

Selain itu, karena ketidakjelasan *nash* itulah kemudian muncul pula perbedaan pendapat mengenai syarat dan ketentuan dari zakat profesi. Dan menanggapi perbedaan ini, sebagian besar *muzakki* berpendapat bahwa syarat dan ketentuan zakat profesi dapat disamakan dengan zakat pada umumnya, yakni dengan nishab 85 gram emas dan prosentase zakat sebesar 2,5%. Sedangkan untuk permasalahan ada atau tidaknya masa setahun (haul) dalam mengeluarkan zakat profesi, mereka sepakat untuk adanya masa haul. Ditegaskan pula oleh responden bahwa akan lebih baik jika masa haul itu ada untuk memudahkan dalam perhitungan, mengingat pengeluaran seseorang kadang berbeda setiap bulannya.²

Dan untuk jenis profesi yang wajib dikeluarkan zakatnya, mereka sepakat untuk mewajibkannya bagi seluruh jenis profesi, selama profesi tersebut jelas dan tidak keluar dari koridor ajaran Islam. Jenis profesi yang wajib dikeluarkan zakatnya tergantung pada pendapatan hasil profesi tersebut, selama pendapatan tersebut memenuhi syarat dan ketentuan, maka wajib dikeluarkan zakatnya.³

Berikut hasil penyebaran kuesioner yang terdiri dari 15 pernyataan mengenai persepsi *muzakki* tentang kontroversi hukum zakat profesi kepada

¹ Nursyamsudin, M.A., Wawancara, (Kamis, 11 November 2010, IAIN Syekh Nurjati Cirebon)

² Aan Jaelani, M.Ag., Wawancara, (Selasa, 16 November 2010, IAIN Syekh Nurjati Cirebon)

³ Dr. H. Kosim, M.Ag., Wawancara, (Kamis, 11 November 2010, IAIN Syekh Nurjati Cirebon)

25 orang dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon, yang mayoritasnya merupakan dosen fakultas syariah.

Tabel 4.1
Pada dasarnya tidak semua jenis harta wajib dikeluarkan zakatnya

No. Item	Tanggapan responden	f	%
1	1. Sangat Setuju (SS)	5	20%
	2. Setuju (S)	14	56%
	3. Ragu-ragu (R)	3	12%
	4. Tidak Setuju (TS)	3	12%
	5. Sangat Tidak Setuju (STS)	-	-
		25	100%

Sumber: Data Primer

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa sebagian besar *muzakki* menyatakan bahwa pada dasarnya tidak semua jenis harta wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini dapat terlihat dari jawaban responden atas pernyataan tersebut, 20% dari total responden menyatakan sangat setuju, 56% menyatakan setuju, 12% menyatakan ragu-ragu, selebihnya 12% menyatakan tidak setuju.

Tabel 4.2
Tidak wajib hukumnya mengeluarkan zakat atas harta yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam Al-Qur'an

No. Item	Tanggapan responden	f	%
2	1. Sangat Setuju (SS)	3	12%
	2. Setuju (S)	12	48%
	3. Ragu-ragu (R)	1	4%
	4. Tidak Setuju (TS)	7	28%
	5. Sangat Tidak Setuju (STS)	2	8%
		25	100%

Sumber: Data Primer

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa lebih dari separuh total *muzakki* yang menjadi objek dalam penelitian ini menyatakan bahwa tidak

wajib hukumnya mengeluarkan zakat atas harta yang tidak ada ketetapan hukumnya dalam Al-Qur'an. Hal ini dapat terlihat dari jawaban responden atas pernyataan tersebut, 12% dari total responden menyatakan sangat setuju, 48% menyatakan setuju, 4% menyatakan ragu-ragu, 28% menyatakan tidak setuju, selebihnya 8% menyatakan sangat tidak setuju.

Tabel 4.3
Zakat hasil kerja profesi merupakan salah satu aspek zakat yang baru dikenal di era modern

No. Item	Tanggapan responden	f	%
3	1. Sangat Setuju (SS)	5	20%
	2. Setuju (S)	12	48%
	3. Ragu-ragu (R)	3	12%
	4. Tidak Setuju (TS)	5	20%
	5. Sangat Tidak Setuju (STS)	-	-
		25	100%

Sumber: Data Primer

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa sebagian besar *muzakki* mengakui bahwa memang zakat hasil kerja profesi merupakan salah satu aspek zakat yang baru dikenal di era modern. Hal ini dapat terlihat dari jawaban responden atas pernyataan tersebut, 20% dari total responden menyatakan sangat setuju, 48% menyatakan setuju, 12% menyatakan ragu-ragu, selebihnya 20% menyatakan tidak setuju.

Tabel 4.4
Zakat hasil kerja profesi merupakan aspek zakat yang ditetapkan hukumnya masih bersifat kontroversial

No. Item	Tanggapan responden	f	%
4	1. Sangat Setuju (SS)	2	8%
	2. Setuju (S)	14	56%
	3. Ragu-ragu (R)	2	8%
	4. Tidak Setuju (TS)	7	28%
	5. Sangat Tidak Setuju (STS)	-	-
		25	100%

Sumber: Data Primer

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa lebih dari separuh total responden mengakui adanya kontroversi mengenai hukum diwajibkannya zakat profesi. Hal ini dapat terlihat dari jawaban responden atas pernyataan tersebut, 8% dari total responden menyatakan sangat setuju, 56% menyatakan setuju, 8% menyatakan ragu-ragu, selebihnya 28% menyatakan tidak setuju.

Tabel 4.5
Perbedaan pendapat mengenai hukum zakat profesi beserta syarat dan ketentuannya masih terjadi di kalangan ulama kontemporer hingga kini

No. Item	Tanggapan responden	f	%
5	1. Sangat Setuju (SS)	4	16%
	2. Setuju (S)	13	52%
	3. Ragu-ragu (R)	3	12%
	4. Tidak Setuju (TS)	5	20%
	5. Sangat Tidak Setuju (STS)	-	-
		25	100%

Sumber: Data Primer

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa sebagian besar *muzakki* mengakui bahwa perbedaan pendapat mengenai hukum zakat profesi beserta syarat dan ketentuannya masih terjadi di kalangan ulama kontemporer hingga kini. Hal ini dapat terlihat dari jawaban responden atas pernyataan tersebut,

16% dari total responden menyatakan sangat setuju, 52% menyatakan setuju, 12% menyatakan ragu-ragu, selebihnya 20% menyatakan tidak setuju.

Tabel 4.6
Al-Qur'an dan As-sunnah tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi

No. Item	Tanggapan responden	f	%
6	1. Sangat Setuju (SS)	8	32%
	2. Setuju (S)	11	44%
	3. Ragu-ragu (R)	1	4%
	4. Tidak Setuju (TS)	4	16%
	5. Sangat Tidak Setuju (STS)	1	4%
		25	100%

Sumber: Data Primer

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa lebih dari separuh responden mengakui bahwa Al-qur'an dan sunnah memang tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi. Hal ini dapat terlihat dari jawaban responden atas pernyataan tersebut, 32% dari total responden menyatakan sangat setuju, 44% menyatakan setuju, 4% menyatakan ragu-ragu, 16% menyatakan tidak setuju, dan selebihnya 4% menyatakan sangat tidak setuju.

Tabel 4.7
Zakat hasil kerja profesi tidak pernah dikenal pada masa Rasulullah atau pada masa terbentuknya madzhab fiqh

No. Item	Tanggapan responden	f	%
7	1. Sangat Setuju (SS)	2	8%
	2. Setuju (S)	18	72%
	3. Ragu-ragu (R)	3	12%
	4. Tidak Setuju (TS)	2	8%
	5. Sangat Tidak Setuju (STS)	-	-
		25	100%

Sumber: Data Primer

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa sebagian besar *muzakki* mengakui bahwa zakat hasil kerja profesi tidak pernah dikenal pada masa Rasulullah atau pada masa terbentuknya madzhab fiqh. Hal ini dapat terlihat dari jawaban responden atas pernyataan tersebut, 8% dari total responden menyatakan sangat setuju, 72% menyatakan setuju, 12% menyatakan ragu-ragu, selebihnya 8% menyatakan tidak setuju.

Tabel 4.8
Zakat hasil kerja profesi merupakan produk ijtihad para ulama masa kini

No. Item	Tanggapan responden	f	%
8	1. Sangat Setuju (SS)	4	16%
	2. Setuju (S)	17	68%
	3. Ragu-ragu (R)	3	12%
	4. Tidak Setuju (TS)	1	4%
	5. Sangat Tidak Setuju (STS)	-	-
		25	100%

Sumber: Data Primer

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa sebagian besar *muzakki* menyatakan bahwa memang zakat hasil kerja profesi merupakan produk ijtihad para ulama masa kini. Hal ini dapat terlihat dari jawaban responden atas pernyataan tersebut, 16% dari total responden menyatakan sangat setuju, 68% menyatakan setuju, 12% menyatakan ragu-ragu, selebihnya 4% menyatakan tidak setuju.

Tabel 4.9
Mereka yang dikenai kewajiban zakat pada hakikatnya bukan karena jenis profesi yang mereka jalani, melainkan mereka telah masuk dalam kategori orang kaya/mampu

No. Item	Tanggapan responden	f	%
9	1. Sangat Setuju (SS)	11	44%
	2. Setuju (S)	7	28%
	3. Ragu-ragu (R)	2	8%
	4. Tidak Setuju (TS)	5	20%
	5. Sangat Tidak Setuju (STS)	-	-
		25	100%

Sumber: Data Primer

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa lebih dari separuh total responden mengakui bahwa muzakki yang dikenai kewajiban zakat pada hakikatnya bukan karena jenis profesi yang mereka jalani, melainkan mereka telah masuk dalam kategori orang kaya/mampu. Hal ini dapat terlihat dari jawaban responden atas pernyataan tersebut, 44% dari total responden menyatakan sangat setuju, 28% menyatakan setuju, 8% menyatakan ragu-ragu, selebihnya 20% menyatakan tidak setuju.

Tabel 4.10
Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai adanya syarat dikenakan zakat bagi sebuah profesi

No. Item	Tanggapan responden	f	%
10	1. Sangat Setuju (SS)	4	16%
	2. Setuju (S)	15	60%
	3. Ragu-ragu (R)	3	12%
	4. Tidak Setuju (TS)	3	12%
	5. Sangat Tidak Setuju (STS)	-	-
		25	100%

Sumber: Data Primer

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa sebagian besar *muzakki* mengakui bahwa memang terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama

mengenai adanya syarat dikenakan zakat bagi sebuah profesi. Hal ini dapat terlihat dari jawaban responden atas pernyataan tersebut, 16% dari total responden menyatakan sangat setuju, 60% menyatakan setuju, 12% menyatakan ragu-ragu, selebihnya 12% menyatakan tidak setuju.

Tabel 4.11
Sebagian dari mereka berpendapat bahwa zakat profesi hanya dikenakan bagi para pekerja professional yang mempunyai penghasilan tinggi. Sedangkan sebagian lain berpendapat bahwa zakat profesi dikenakan bagi seluruh jenis profesi

No. Item	Tanggapan responden	f	%
11	1. Sangat Setuju (SS)	3	12%
	2. Setuju (S)	15	60%
	3. Ragu-ragu (R)	3	12%
	4. Tidak Setuju (TS)	4	16%
	5. Sangat Tidak Setuju (STS)	-	-
		25	100%

Sumber: Data Primer

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa sebagian besar *muzakki* mengakui adanya perbedaan pendapat mengenai jenis profesi yang wajib dikeluarkan zakatnya. Hal ini dapat terlihat dari jawaban responden atas pernyataan tersebut, 12% dari total responden menyatakan sangat setuju, 60% menyatakan setuju, 12% menyatakan ragu-ragu, selebihnya 16% menyatakan tidak setuju.

Tabel 4.12
Akibatnya muncul perbedaan pendapat mengenai ketetapan hukum zakat profesi. Sebagian mewajibkan dan sebagian lainnya tidak mewajibkan

No. Item	Tanggapan responden	f	%
12	1. Sangat Setuju (SS)	3	12%
	2. Setuju (S)	17	68%
	3. Ragu-ragu (R)	2	8%

	4. Tidak Setuju (TS)	3	12%
	5. Sangat Tidak Setuju (STS)	-	-
		25	100%

Sumber: Data Primer

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa sebagian besar *muzakki* mengakui adanya perbedaan pendapat mengenai ketetapan hukum zakat profesi. Hal ini dapat terlihat dari jawaban responden atas pernyataan tersebut, 12% dari total responden menyatakan sangat setuju, 68% menyatakan setuju, 8% menyatakan ragu-ragu, selebihnya 12% menyatakan tidak setuju.

Tabel 4.13
Terdapat perbedaan pendapat mengenai ketentuan nishab zakat profesi.
Sebagian meng-*qiyas*-kannya dengan zakat pertanian dan sebagian lain
meng-*qiyas*-kannya dengan zakat emas dan perak

No. Item	Tanggapan responden	f	%
13	1. Sangat Setuju (SS)	3	12%
	2. Setuju (S)	15	60%
	3. Ragu-ragu (R)	4	16%
	4. Tidak Setuju (TS)	3	12%
	5. Sangat Tidak Setuju (STS)	-	-
		25	100%

Sumber: Data Primer

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa sebagian besar *muzakki* mengakui adanya perbedaan mengenai ketentuan nishab zakat profesi, bahwa sebagian meng-*qiyas*-kannya dengan zakat pertanian dan sebagian lain meng-*qiyas*-kannya dengan zakat perhiasan. Hal ini dapat terlihat dari jawaban responden atas pernyataan tersebut, 12% dari total responden menyatakan sangat setuju, 60% menyatakan setuju, 16% menyatakan ragu-ragu, selebihnya 12% menyatakan tidak setuju.

Tabel 4.14
Ketentuan masa haul pun masih menjadi perdebatan. Sebagian mensyaratkan masa setahun dan sebagian lain mensyaratkan untuk mengeluarkannya pada waktu harta tersebut diperoleh

No. Item	Tanggapan responden	f	%
14	1. Sangat Setuju (SS)	5	20%
	2. Setuju (S)	15	60%
	3. Ragu-ragu (R)	3	12%
	4. Tidak Setuju (TS)	2	8%
	5. Sangat Tidak Setuju (STS)	-	-
		25	100%

Sumber: Data Primer

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa sebagian besar *muzakki* mengakui adanya perbedaan pendapat mengenai keberadaan masa haul sebagai salah satu syarat ditunaikannya zakat profesi. Hal ini dapat terlihat dari jawaban responden atas pernyataan tersebut, 20% dari total responden menyatakan sangat setuju, 60% menyatakan setuju, 12% menyatakan ragu-ragu, selebihnya 8% menyatakan tidak setuju.

Tabel 4.15
Mengenai prosentase perhitungannya, sebagian meng-*qiyas*-kan dengan zakat pertanian yakni sebesar 5% atau 10% dan sebagian lain menyamakan perhitungannya dengan zakat pada umumnya yakni sebesar 2,5%

No. Item	Tanggapan responden	f	%
15	1. Sangat Setuju (SS)	6	24%
	2. Setuju (S)	15	60%
	3. Ragu-ragu (R)	2	8%
	4. Tidak Setuju (TS)	2	8%
	5. Sangat Tidak Setuju (STS)	-	-
		25	100%

Sumber: Data Primer

Dari tabel di atas dapat dipahami pula bahwa sebagian besar *muzakki* mengakui adanya perbedaan pendapat mengenai prosentase perhitungan zakat

profesi. Hal ini dapat terlihat dari jawaban responden atas pernyataan tersebut, 24% dari total responden menyatakan sangat setuju, 60% menyatakan setuju, 8% menyatakan ragu-ragu, selebihnya 8% menyatakan tidak setuju.

Tabel 4.16
Rekapitulasi Persepsi muzakki tentang kontroversi hukum zakat profesi
Prosentase variabel X

No. Item	Alternatif Jawaban					Jumlah
	5	4	3	2	1	
1	20%	56%	12%	12%	-	100%
2	12%	48%	4%	28%	8%	100%
3	20%	48%	12%	20%	-	100%
4	8%	56%	8%	28%	-	100%
5	16%	52%	12%	20%	-	100%
6	32%	44%	4%	16%	4%	100%
7	8%	72%	12%	8%	-	100%
8	16%	68%	12%	4%	-	100%
9	44%	28%	8%	20%	-	100%
10	16%	60%	12%	12%	-	100%
11	12%	60%	12%	16%	-	100%
12	12%	68%	8%	12%	-	100%
13	12%	60%	16%	12%	-	100%
14	20%	60%	12%	8%	-	100%
15	24%	60%	8%	8%	-	100%
Jumlah	272%	840%	152%	224%	12%	100%
Rata-rata	18,13%	56%	10,13%	14,94%	0,8%	100%

Sumber: Data Primer

Berdasarkan tabel rekapitulasi diatas, dapat disimpulkan bahwa tanggapan para *muzakki* mengenai diwajibkannya hukum zakat profesi menunjukan bahwa 18,13% dari total responden menyatakan sangat setuju,

56% menyatakan setuju, 10,13% masih meragukannya, 14,94% menyatakan tidak setuju, dan 0,8% menyatakan sangat tidak setuju.

2. Kesadaran Zakat (Perilaku Zakat) Muzakki

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa kesadaran berzakat dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, seperti misalnya kadar religiusitas, kepribadian, sikap, motivasi, hingga persepsi seseorang mengenai zakat itu sendiri. Selain itu, kesadaran berzakat dapat dipengaruhi pula oleh pengetahuan atau pemahaman seseorang tentang makna zakat itu sendiri. Semakin seseorang mengerti tentang zakat, maka kesadaran untuk menunaikannya pun akan sangat dipengaruhi olehnya. Bagaimana seseorang memandang seberapa pentingnya zakat, dari sanalah orang tersebut akan berperilaku sesuai dengan pola pikir mereka. Selain itu, menurut beliau kesadaran berzakat juga dapat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah atau atasan.⁴

Sementara itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran berzakat responden dapat dikatakan cukup baik. Mereka mengaku tidak terganggu dengan adanya isu mengenai kontroversi hukum zakat profesi tersebut, serta sebagian besar dari mereka telah sepakat dengan diwajibkannya zakat profesi. Bahkan mereka tidak ragu untuk menjalankan perannya sebagai *muzakki*, yakni menunaikan kewajiban zakatnya.

⁴ Aan Jaelani, M.Ag., Wawancara, (Selasa, 16 November 2010, IAIN Syekh Nurjati Cirebon)

Meskipun ada beberapa responden yang menyatakan bahwa zakat tidak hanya dapat dilakukan dengan pendekatan *tafsili* (sesuai dengan norma fiqh), tapi juga dapat dilakukan dengan pendekatan *ijmali*. Serta beberapa responden yang masih kesulitan dalam menentukan batas nishab, haul serta prosentase perhitungan zakat profesi.

Selain itu, untuk menguji tingkat kesadaran mereka dalam hal menunaikan kewajiban berzakat, peneliti mencoba bertanya tentang infaq dan shodaqoh yang mungkin dapat dijadikan alternatif solusi dari kewajiban membersihkan harta serta adanya ketidakjelasan hukum dari zakat profesi itu sendiri. Dan lebih dari separuh total responden menyatakan bahwa peran zakat tidak dapat digantikan dengan infaq dan shodaqoh, terutama dalam hal membersihkan harta. Ini pula yang menjadikan mereka lebih mendahulukan menunaikan zakat profesi dari pada infaq dan shodaqoh. Meski sebagian dari mereka mengaku lebih fleksibel dalam menunaikan zakatnya (tidak sesuai dengan ketentuan zakat).

Berikut hasil penyebaran kuesioner yang terdiri dari 15 item pernyataan mengenai tingkat kesadaran berzakat kepada 25 orang responden (dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon), yang mayoritasnya merupakan dosen fakultas syariah.

Tabel 4.17

Dalam masalah ibadah kita diharuskan mengikuti dalil yang jelas dan shahih, dan dalam hal ini zakat profesi termasuk dalam aspek zakat yang ketetapan hukumnya masih belum jelas

No. Item	Tanggapan responden	f	%
1	1. Sangat Setuju (SS)	4	16%
	2. Setuju (S)	12	48%
	3. Ragu-ragu (R)	-	-
	4. Tidak Setuju (TS)	9	36%
	5. Sangat Tidak Setuju (STS)	-	-
		25	100%

Sumber: Data Primer

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa sebagian besar *muzakki* menyatakan bahwa dalam masalah ibadah kita diharuskan mengikuti dalil yang jelas dan shahih, serta sebagian dari mereka mengakui bahwa zakat profesi termasuk dalam aspek zakat yang ketetapan hukumnya masih belum jelas. Hal ini dapat terlihat dari jawaban responden atas pernyataan tersebut, 16% dari total responden menyatakan sangat setuju, 48% menyatakan setuju, selebihnya 32% menyatakan tidak setuju.

Tabel 4.18

Tidak diharuskan adanya tafsir baru mengenai ayat-ayat Al-qur'an dalam konteks harta benda yang harus dizakati

No. Item	Tanggapan responden	f	%
2	1. Sangat Setuju (SS)	-	-
	2. Setuju (S)	5	20%
	3. Ragu-ragu (R)	3	12%
	4. Tidak Setuju (TS)	14	56%
	5. Sangat Tidak Setuju (STS)	3	12%
		25	100%

Sumber: Data Primer

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa lebih dari separuh total *muzakki* yang menjadi objek dalam penelitian ini menentang pernyataan

bahwa tidak diharuskan adanya tafsir baru mengenai ayat-ayat Al-qur'an dalam konteks harta benda yang harus dizakati. Hal ini dapat terlihat dari jawaban responden atas pernyataan tersebut, hanya 20% dari total responden yang menyatakan setuju, 12% menyatakan ragu-ragu, selebihnya 56% menyatakan tidak setuju, dan 12% menyatakan sangat tidak setuju.

Tabel 4.19
Zakat masuk dalam kategori ibadah mahdah yang telah permanen dan tidak menerima ijtihad didalamnya

No. Item	Tanggapan responden	f	%
3	1. Sangat Setuju (SS)	1	4%
	2. Setuju (S)	5	20%
	3. Ragu-ragu (R)	2	8%
	4. Tidak Setuju (TS)	15	60%
	5. Sangat Tidak Setuju (STS)	2	8%
		25	100%

Sumber: Data Primer

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa sebagian besar responden menentang pernyataan bahwa zakat masuk dalam kategori ibadah mahdah yang telah permanen dan tidak menerima ijtihad didalamnya. Hal ini dapat terlihat dari jawaban responden atas pernyataan tersebut, hanya 4% dari total responden yang menyatakan sangat setuju, 20% menyatakan setuju, 8% menyatakan ragu-ragu, selebihnya 60% menyatakan tidak setuju serta 8% menyatakan sangat tidak setuju.

Tabel 4.20
Bapak/ibu terganggu dengan adanya fenomena kontroversi hukum zakat profesi, terlebih menyangkut kewajiban berzakat. Mengingat bapak/ibu masuk dalam kategori mereka yang berprofesi

No. Item	Tanggapan responden	f	%
4	1. Sangat Setuju (SS)	1	4%
	2. Setuju (S)	2	8%
	3. Ragu-ragu (R)	4	16%
	4. Tidak Setuju (TS)	16	64%
	5. Sangat Tidak Setuju (STS)	2	8%
		25	100%

Sumber: Data Primer

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa sebagian besar responden merasa tidak terganggu dengan adanya fenomena kontroversi hukum zakat profesi. Hal ini dapat terlihat dari jawaban responden atas pernyataan tersebut, hanya 4% dari total responden menyatakan sangat setuju, 8% menyatakan setuju, 16% menyatakan ragu-ragu, selebihnya 64% menyatakan tidak setuju dan 8% menyatakan sangat tidak setuju. Artinya hanya sekitar 12% yang mengaku terganggu dengan isu tersebut.

Tabel 4.21
Bapak/ibu sepakat dengan tidak diwajibkannya zakat profesi

No. Item	Tanggapan responden	f	%
5	1. Sangat Setuju (SS)	-	-
	2. Setuju (S)	4	16%
	3. Ragu-ragu (R)	-	-
	4. Tidak Setuju (TS)	18	72%
	5. Sangat Tidak Setuju (STS)	3	12%
		25	100%

Sumber: Data Primer

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa sebagian besar *muzakki* menyatakan sepakat dengan diwajibkannya hukum zakat profesi. Hal ini dapat

terlihat dari jawaban responden atas pernyataan tersebut, hanya sekitar 16% dari total responden yang menentang diwajibkannya hukum zakat profesi. selebihnya 72% menyatakan sepakat dan 12% menyatakan sangat sepakat dengan diwajibkannya zakat profesi.

Tabel 4.22
Bapak/ibu ragu untuk menunaikan kewajiban zakat profesi

No. Item	Tanggapan responden	f	%
6	1. Sangat Setuju (SS)	-	-
	2. Setuju (S)	3	12%
	3. Ragu-ragu (R)	1	4%
	4. Tidak Setuju (TS)	17	68%
	5. Sangat Tidak Setuju (STS)	4	16%
		25	100%

Sumber: Data Primer

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa sebagian besar responden tidak ragu untuk menunaikan kewajiban zakat profesinya. Hal ini dapat terlihat dari jawaban responden atas pernyataan tersebut, hanya 12% dari total responden yang masih ragu untuk menunaikan kewajiban zakatnya, 4% menyatakan ragu-ragu, selebihnya 68% dari total responden tidak ragu, serta 16% sangat tidak ragu untuk menunaikan kewajiban zakatnya.

Tabel 4.23
Pada dasarnya ketetapan nishab zakat serta perhitungannya hanya dapat dilakukan dengan pendekatan tafsili, dan tidak dengan pendekatan lain (seperti pendekatan ijmal)

No. Item	Tanggapan responden	f	%
7	1. Sangat Setuju (SS)	3	12%
	2. Setuju (S)	6	24%
	3. Ragu-ragu (R)	3	12%
	4. Tidak Setuju (TS)	12	48%
	5. Sangat Tidak Setuju (STS)	1	4%
		25	100%

Sumber: Data Primer

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa lebih dari separuh total responden mengaku bahwa ketetapan nishab zakat serta perhitungannya tidak hanya dapat dilakukan dengan pendekatan tafsili (sesuai dengan norma fiqh), tetapi juga dapat dilakukan dengan pendekatan ijmal. Hal ini dapat terlihat dari jawaban responden atas pernyataan tersebut, 4% dan 24% dari total responden menyatakan bahwa ketetapan nishab zakat dan perhitungannya hanya dapat dilakukan dengan pendekatan tafsili, 12% menyatakan ragu-ragu, selebihnya 48% dan 4% menentang pernyataan tersebut.

Tabel 4.24
Perbedaan penentuan nishab zakat profesi menyebabkan bapak/ibu sulit dalam menentukan batas minimal zakat

No. Item	Tanggapan responden	f	%
8	1. Sangat Setuju (SS)	2	8%
	2. Setuju (S)	3	12%
	3. Ragu-ragu (R)	3	12%
	4. Tidak Setuju (TS)	17	68%
	5. Sangat Tidak Setuju (STS)	-	-
		25	100%

Sumber: Data Primer

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa lebih separuh total responden mengaku tidak kesulitan dalam menentukan batas nishab zakat profesi meski hal tersebut masih menjadi kontroversi dikalangan para ulama. Hal ini dapat terlihat dari jawaban responden atas pernyataan tersebut, 8% dari total responden menyatakan sangat sulit, 12% menyatakan sulit, 12% menyatakan ragu-ragu, selebihnya 68% menyatakan tidak sulit.

Tabel 4.25
Perbedaan penentuan adanya masa haul menyebabkan bapak/ibu sulit
dalam menetapkan waktu pengeluaran zakat

No. Item	Tanggapan responden	f	%
9	1. Sangat Setuju (SS)	1	4%
	2. Setuju (S)	5	20%
	3. Ragu-ragu (R)	2	8%
	4. Tidak Setuju (TS)	17	68%
	5. Sangat Tidak Setuju (STS)	-	-
		25	100%

Sumber: Data Primer

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa lebih dari separuh total responden mengaku tidak kesulitan dalam menetapkan waktu pengeluaran zakatnya, meski hal tersebut masih menjadi kontroversi kalangan para ulama. Hal ini dapat terlihat dari jawaban responden atas pernyataan tersebut, 4% dari total responden menyatakan sangat sulit, 20% menyatakan sulit, 8% menyatakan ragu-ragu, selebihnya 68% menyatakan tidak sulit.

Tabel 4.26
Perbedaan penentuan besarnya prosentase perhitungan zakat profesi
menyebabkan bapak/ibu sulit menghitung dana zakat yang harus
dikeluarkan

No. Item	Tanggapan responden	f	%
10	1. Sangat Setuju (SS)	1	4%
	2. Setuju (S)	7	28%
	3. Ragu-ragu (R)	1	4%
	4. Tidak Setuju (TS)	16	64%
	5. Sangat Tidak Setuju (STS)	-	-
		25	100%

Sumber: Data Primer

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa lebih dari separuh total responden mengaku tidak kesulitan dalam menghitung dana zakat yang harus mereka keluarkan, meski hal tersebut masih menjadi kontroversi kalangan

para ulama . Hal ini dapat terlihat dari jawaban responden atas pernyataan tersebut, 4% dari total responden mengaku sangat sulit, 28% mengaku sulit, 4% mengaku ragu-ragu, selebihnya 64% mengaku tidak sulit.

Tabel 4.27
Bapak/ibu menjadi lebih fleksibel dalam menunaikan zakat profesi
(tidak sepenuhnya mengikuti syarat dan ketentuan)

No. Item	Tanggapan responden	f	%
11	1. Sangat Setuju (SS)	4	16%
	2. Setuju (S)	10	40%
	3. Ragu-ragu (R)	1	4%
	4. Tidak Setuju (TS)	10	40%
	5. Sangat Tidak Setuju (STS)	-	-
		25	100%

Sumber: Data Primer

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa lebih dari separuh total responden mengaku bahwa mereka lebih fleksibel dalam menunaikan zakatnya (tidak sepenuhnya mengikuti syarat dan ketentuan zakat profesi). Hal ini dapat terlihat dari jawaban responden atas pernyataan tersebut, 16% dari total responden menyatakan sangat setuju, 40% menyatakan setuju, 4% menyatakan ragu-ragu, selebihnya 40% menyatakan tidak setuju.

Tabel 4.28
Mengingat ketentuan nishab, haul dan prosentase zakat profesi masih
belum jelas, maka kewajiban menunaikan zakat hasil kerja profesi dapat
digantikan dalam bentuk infaq dan shodaqoh yang tidak terikat oleh
beberapa ketentuan

No. Item	Tanggapan responden	f	%
12	1. Sangat Setuju (SS)	1	4%
	2. Setuju (S)	7	28%
	3. Ragu-ragu (R)	3	12%
	4. Tidak Setuju (TS)	12	48%
	5. Sangat Tidak Setuju (STS)	2	8%
		25	100%

Sumber: Data Primer

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa lebih dari separuh total responden menentang pernyataan bahwa zakat profesi dapat digantikan dalam bentuk infaq dan shodaqoh. Hal ini dapat terlihat dari jawaban responden atas pernyataan tersebut, 4% dari total responden menyatakan sangat setuju, 28% menyatakan setuju, 12% menyatakan ragu-ragu, selebihnya 48% menyatakan tidak setuju, serta 8% menyatakan sangat tidak setuju.

Tabel 4.29
Infaq dan shodaqoh pada hakikatnya sama dengan zakat dalam hal membersihkan harta

No. Item	Tanggapan responden	f	%
13	1. Sangat Setuju (SS)	3	12%
	2. Setuju (S)	6	24%
	3. Ragu-ragu (R)	2	8%
	4. Tidak Setuju (TS)	13	52%
	5. Sangat Tidak Setuju (STS)	1	4%
		25	100%

Sumber: Data Primer

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa separuh dari total responden menentang pernyataan bahwa infaq dan shodaqoh pada hakikatnya sama dengan zakat dalam hal membersihkan harta. Hal ini dapat terlihat dari jawaban responden atas pernyataan tersebut, 9% dari total responden menyatakan sangat setuju, 24% menyatakan setuju, 8% menyatakan ragu-ragu, selebihnya 52% menyatakan tidak setuju dan 4% menyatakan sangat tidak setuju.

Tabel 4.30
Bapak/ibu lebih memilih menunaikan infaq dan shodaqoh daripada zakat profesi

No. Item	Tanggapan responden	f	%
14	1. Sangat Setuju (SS)	1	4%
	2. Setuju (S)	7	28%
	3. Ragu-ragu (R)	1	4%
	4. Tidak Setuju (TS)	14	56%
	5. Sangat Tidak Setuju (STS)	2	8%
		25	100%

Sumber: Data Primer

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa lebih dari separuh total responden lebih memilih menunaikan zakat profesi daripada infaq dan shodaqoh. Hal ini dapat terlihat dari jawaban responden atas pernyataan tersebut, 4% dari total responden menyatakan sangat setuju, 28% menyatakan setuju, 4% menyatakan ragu-ragu, selebihnya 56% menyatakan tidak setuju dan 8% menyatakan sangat tidak setuju.

Tabel 4.31
Perbedaan pendapat mengenai hukum dan beberapa ketentuan zakat profesi berpengaruh pada kesadaran berzakat masyarakat pada umumnya

No. Item	Tanggapan responden	f	%
15	1. Sangat Setuju (SS)	2	8%
	2. Setuju (S)	9	36%
	3. Ragu-ragu (R)	2	8%
	4. Tidak Setuju (TS)	12	48%
	5. Sangat Tidak Setuju (STS)	-	-
		25	100%

Sumber: Data Primer

Dari tabel di atas dapat dipahami pula bahwa 8% dari total responden mengaku sangat setuju bahwa memang perbedaan pendapat mengenai hukum dan beberapa ketentuan zakat profesi akan berpengaruh pada kesadaran

berzakat masyarakat pada umumnya, sedangkan 36% menyatakan setuju, 8% menyatakan ragu-ragu, selebihnya 48% menyatakan tidak setuju.

Tabel 4.32
Rekapitulasi Tingkat Kesadaran Berzakat
Prosentase variabel Y

No. Item	Alternatif Jawaban					Jumlah
	5	4	3	2	1	
1	16%	48%	-	36%	-	100%
2	-	20%	12%	56%	12%	100%
3	4%	20%	8%	60%	8%	100%
4	4%	8%	16%	64%	8%	100%
5	-	16%	-	72%	12%	100%
6	-	12%	4%	68%	16%	100%
7	12%	24%	12%	48%	4%	100%
8	8%	12%	12%	68%	-	100%
9	4%	20%	8%	68%	-	100%
10	4%	28%	4%	64%	-	100%
11	16%	40%	4%	40%	-	100%
12	4%	28%	12%	48%	8%	100%
13	12%	24%	8%	52%	4%	100%
14	4%	28%	4%	56%	8%	100%
15	8%	36%	8%	48%	-	100%
Jumlah	96%	364%	112%	848%	80%	100%
Rata-rata	6,4%	24,27%	7,47%	56,53%	5,33%	100%

Sumber: Data Primer

Dari tabel rekapitulasi diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran berzakat responden dengan adanya kontroversi hukum zakat profesi tersebut menunjukkan bahwa 6,4% untuk kategori sangat tidak baik, 24, 27% untuk kategori tidak baik, 7,47% untuk kategori sedang, 56,53% untuk kategori baik, dan 5,33% untuk kategori sangat baik.

3. Uji Instrumen Penelitian

Sebelum melakukan interpretasi kedua variabel yang diteliti dengan metode statistik, maka terlebih dahulu peneliti melakukan uji coba instrumen penelitian yang digunakan untuk meneliti, yaitu dengan uji validitas dan uji reliabilitas.

a. Uji Validitas Instrumen Penelitian

Instrumen yang valid adalah instrumen yang mampu mengukur sesuatu dengan tepat. Pengujian validitas tiap butirnya menggunakan analisis item, yaitu mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah tiap butir skor. Instrumen yang akan diuji adalah instrumen persepsi *muzakki* tentang kontroversi hukum zakat profesi dan kesadaran berzakat. Instrumen ini terdiri dari 15 pertanyaan, dimana tiap item disisipkan 5 interval jawaban. Jawaban terendah diberi skor 1 dan jawaban tertinggi diberi skor 5.

Langkah-langkah pengujian validitas instrumen adalah sebagai berikut:

1. Penulis memberikan skor pada setiap item pertanyaan baik untuk variabel X maupun variabel Y dari masing-masing responden.
2. Menghitung skor total dari item pertanyaan (X), skor total dari masing-masing responden (Y), skor total dari masing-masing item pertanyaan dari masing-masing responden setelah dikuadratkan (X^2),

skor total dari masing-masing responden setelah dikuadratkan ($\sum Y^2$), dan skor total dari hasil perkalian setiap item pertanyaan tiap-tiap responden dengan skor total masing-masing responden ($\sum XY$).

3. Setelah dilakukan perhitungan untuk setiap item pertanyaan variabel X dan variabel Y, selanjutnya dimasukan ke dalam rumus korelasi *product moment*.

Berikut contoh perhitungan untuk item pertanyaan no.1 variabel X:

$$\begin{aligned}
 r_{xy} &= \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n(\sum X^2) - (\sum X)^2\} \{n(\sum Y^2) - (\sum Y)^2\}}} \\
 &= \frac{25.5518 - (96)(1409)}{\sqrt{\{25(388) - (96)^2\} \{25(80755) - (1409)^2\}}} \\
 &= \frac{137950 - 135264}{\sqrt{\{9700 - 9216\} \{2018875 - 1985281\}}} \\
 &= \frac{2686}{\sqrt{\{484\} \{33594\}}} \\
 &= \frac{2686}{\sqrt{16259496}} \\
 &= \frac{2686}{4032,307} \\
 &= 0,666
 \end{aligned}$$

4. Setelah memperoleh nilai koefisien korelasi, maka dikonsultasikan ke tabel harga kritis *product moment* untuk $n = 25$ dengan tingkat kepercayaan 95%, maka $r_{tabel} = 0,396$. Jika r_{hitung} lebih besar dari

$r_{\text{tabel}}(r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}})$, maka item pertanyaan dinyatakan valid. Dengan demikian maka item pertanyaan no.1 untuk variabel X dinyatakan valid, karena r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} ($0,666 > 0,396$).

5. Setelah melalui beberapa tahapan dalam melakukan uji validitas terhadap 15 (lima belas) item pertanyaan seperti contoh diatas, maka peneliti sajikan data lengkap hasil perhitungan uji validitas item pertanyaan variabel X.

Tabel 4.33
Rekapitulasi Hasil Perhitungan
Uji Validitas Instrumen Variabel X
(Persepsi Muzakki tentang Kontroversi Hukum Zakat Profesi)

Nomor Item	Koefisien Korelasi	Keterangan
1	0,666	Valid
2	0,485	Valid
3	0,713	Valid
4	0,723	Valid
5	0,460	Valid
6	0,582	Valid
7	0,471	Valid
8	0,572	Valid
9	0,613	Valid
10	0,693	Valid
11	0,435	Valid
12	0,769	Valid
13	0,796	Valid

14	0,800	Valid
15	0,757	Valid

Sumber: Data Primer

Dari hasil perhitungan uji validitas instrumen variabel X (persepsi *muzakki* tentang kontroversi hukum zakat profesi) tersebut, menunjukkan bahwa 15 pertanyaan yang diajukan kepada responden dinyatakan valid.

Selanjutnya peneliti sajikan contoh perhitungan untuk item pertanyaan no.1 variabel Y:

$$\begin{aligned}
 r_{xy} &= \frac{n - \left(\frac{\sum X}{n} \right) \left(\frac{\sum Y}{n} \right)}{\sqrt{\left\{ n \left(\frac{\sum X^2}{n} \right) - \left(\frac{\sum X}{n} \right)^2 \right\} \left\{ n \left(\frac{\sum Y^2}{n} \right) - \left(\frac{\sum Y}{n} \right)^2 \right\}}} \\
 &= \frac{25.3635 - (86)(1012)}{\sqrt{\left\{ 25(328) - (86)^2 \right\} \left\{ 25(43192) - (1012)^2 \right\}}} \\
 &= \frac{90875 - 87032}{\sqrt{\{8200 - 7396\} \{1079800 - 1024144\}}} \\
 &= \frac{3843}{\sqrt{\{804\} \{55656\}}} \\
 &= \frac{3843}{\sqrt{44747424}} \\
 &= \frac{3843}{6689,352} \\
 &= 0,574
 \end{aligned}$$

6. Setelah memperoleh nilai koefisien korelasi, maka dikonsultasikan ke tabel harga kritis *product moment* untuk $n = 25$ dengan tingkat kepercayaan 95%, maka $r_{\text{tabel}} = 0,396$. Jika r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} ($r_{\text{hitung}} > r_{\text{tabel}}$), maka item pertanyaan dinyatakan valid. Dengan demikian maka item pertanyaan no.1 untuk variabel Y dinyatakan valid, karena r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} ($0,574 > 0,396$).
7. Setelah melalui beberapa tahapan dalam melakukan uji validitas terhadap 15 (lima belas) item pertanyaan seperti contoh diatas, maka peneliti sajikan data lengkap hasil perhitungan uji validitas item pertanyaan variabel Y.

Tabel 4.34
Rekapiulasi Hasil Perhitungan
Uji Validitas Instrumen Variabel Y
(Kesadaran Berzakat)

Nomor Item	Koefisien Korelasi	Keterangan
1	0,574	Valid
2	0,611	Valid
3	0,748	Valid
4	0,599	Valid
5	0,602	Valid
6	0,741	Valid
7	0,483	Valid
8	0,795	Valid
9	0,794	Valid

10	0,772	Valid
11	0,752	Valid
12	0,741	Valid
13	0,571	Valid
14	0,639	Valid
15	0,423	Valid

Sumber: Data Primer

Dari hasil perhitungan uji validitas instrument variabel X (persepsi *muzakki* tentang kontroversi hukum zakat profesi) tersebut, menunjukkan bahwa 15 pertanyaan yang diajukan kepada responden dinyatakan valid.

b. Uji Reliabilitas Instrumen Penelitian

Setelah peneliti melakukan uji validias, maka langkah selanjunya adalah melakukan uji reliabilitas. Setiap instrumen yang akan digunakan untuk meneliti harus reliabel (dapat dipercaya), sehingga mempunyai nilai ketetapan dan apabila di testkan pada kelompok yang sama dengan waktu yang berbeda akan memiliki nilai yang sama. Instrumen yang akan diuji adalah instrumen persepsi *muzakki* tentang kontroversi hukum zakat profesi dan kesadaran berzakat.

Rumus yang digunakan dalam pengujian reliabilitas adalah *internal consistency* melalui teknik belah dua (*split half*). Pengujian reliabilias dengan teknik ini dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali

saja, kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas instrumen. Langkah-langkah dalam uji reliabilitas adalah sebagai berikut:

1. Membelah instrumen menjadi dua kelompok, yaitu kelompok genap dan kelompok ganjil untuk masing-masing variabel.
2. Menghitung skor total instrumen ganjil (X), menghitung skor total instrumen genap (Y), menghitung skor total instrumen ganjil yang telah dikuadratkan (X²), menghitung skor total instrumen genap yang telah dikuadratkan (Y²), menghitung skor total dari hasil perkalian instrumen ganjil dan genap (XY). Setelah dilakukan perhitungan, kemudian dimasukkan kedalam korelasi *product moment*. (dapat dilihat pada lampiran)

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

3. Untuk memperoleh nilai koefisien korelasi, peneliti menggunakan rumus *spearman brown*.

$$r_i = \frac{2 \times r_b}{1 + r_b}$$

Berikut penulis sajikan perhitungan uji reliabilitas untuk variabel X:

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{25.20012 - (758)(651)}{\sqrt{\{25(23448) - (758)^2\}\{25(17283) - (651)^2\}}} \\
&= \frac{500300 - 493458}{\sqrt{\{586200 - 574564\}\{432075 - 423801\}}} \\
&= \frac{6842}{\sqrt{\{11636\}\{8274\}}} \\
&= \frac{6842}{\sqrt{96276264}} \\
&= \frac{6842}{9812,047} \\
&= 0,697
\end{aligned}$$

Perhitungan uji reliabilitas untuk variabel Y:

$$\begin{aligned}
r_{xy} &= \frac{n - \left(\frac{\sum X}{n} \right) \left(\frac{\sum Y}{n} \right)}{\sqrt{\left\{ n \left(\frac{\sum X^2}{n} - \left(\frac{\sum X}{n} \right)^2 \right) \left\{ n \left(\frac{\sum Y^2}{n} - \left(\frac{\sum Y}{n} \right)^2 \right) \right\}}} \\
&= \frac{25.10576 - (573)(439)}{\sqrt{\{25(13709) - (573)^2\}\{25(8331) - (439)^2\}}} \\
&= \frac{264400 - 251547}{\sqrt{\{342725 - 328329\}\{208275 - 192721\}}} \\
&= \frac{12853}{\sqrt{\{14396\}\{15554\}}} \\
&= \frac{12853}{\sqrt{223915384}} \\
&= \frac{12853}{14963,802} \\
&= 0,859
\end{aligned}$$

Setelah memperoleh nilai koefisien korelasi, kemudian nilai tersebut dimasukan ke dalam rumus *spearman brown*. Berikut untuk perhitungan variabel X (persepsi *muzakki* tentang kontroversi hukum zakat profesi):

$$\begin{aligned} r_i &= \frac{2 \times r_b}{1 + r_b} \\ &= \frac{2 \times 0,697}{1 + 0,697} \\ &= \frac{1,394}{1,697} \\ &= 0,821 \end{aligned}$$

Untuk perhitungan variabel Y (Kesadaran berzakat):

$$\begin{aligned} r_i &= \frac{2 \times r_b}{1 + r_b} \\ &= \frac{2 \times 0,859}{1 + 0,859} \\ &= \frac{1,718}{1,859} \\ &= 0,924 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitngan uji reliabilitas dengan menggunakan rumus *spearman brown*, variabel X (persepsi *muzakki* tentang kontroversi hukum zakat profesi) memperoleh nilai $r = 0,821$ dan variabel Y (kesadaran berzakat) memperoleh nilai $r = 0,924$. Maka kedua instrumen tersebut dinyatakan reliabel, karena telah dikonfirmasi dengan tabel harga kritis *product moment* dengan $n =$

25 dan tingkat kepercayaan 95% diperoleh $r = 0,396$, dimana $r_{hitung} >$

r_{tabel} ($0,821 > 0,396$ dan $0,924 > 0,396$)

B. Pembahasan

1. Gambaran mengenai Pengaruh Persepsi *Muzakki* tentang kontroversi Hukum Zakat Profesi terhadap Tingkat Kesadaran Berzakat

a. Analisis Koefisien Korelasi

Untuk mengetahui hubungan antara persepsi *muzakki* tentang kontroversi hukum zakat profesi dengan tingkat kesadaran berzakat, peneliti melakukan uji koefisien korelasi dengan menggunakan rumus *spearman rank* dengan hipotesis sebagai berikut.

Untuk menghitung korelasi *spearman rank*, peneliti melakukan beberapa tahapan, yaitu:

1. Menentukan skor hasil angket, dimana tiap item pertanyaan telah disiapkan 5 (lima) interval jawaban.
2. Melakukan uji analisis data melalui uji validitas dan reliabilitas instrumen.
3. Karena *spearman rank* bekerja dengan menggunakan data ordinal, maka peneliti mengubah data tersebut terlebih dahulu ke dalam ranking.
4. Dari data ordinal variabel X dan variabel Y peneliti menyusun sebuah tabel penolong untuk mengubah data ordinal yang telah disusun berdasarkan ranking agar dapat diperoleh selisih nilai antara variabel X dan variabel Y (b_i^2). (dapat dilihat pada lampiran 15)

Berikut perhitungan korelasi Spearmman Rank:

$$\begin{aligned}
\dots &= 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)} \\
&= 1 - \frac{6 \times 2175,5}{25(25^2 - 1)} \\
&= 1 - \frac{13053}{25(625 - 1)} \\
&= 1 - \frac{13053}{15600} \\
&= 1 - 0,837 \\
&= 0,163
\end{aligned}$$

Dari perhitungan tersebut diatas, diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar $r = 0,163$. Untuk dapat memberikan interpretasi terhadap eratnya hubungan antara variabel X (persepsi *muzakki* tentang kontroversi hukum zakat profesi) dengan variabel Y (kesadaran berzakat), maka penulis berpedoman pada tabel 3.2

Jika melihat tabel tersebut, maka koefisien korelasi *spearman rank* $r = 0,163$ dapat dikategorikan pada koefisien korelasi sangat rendah (0,000-0,200). Artinya bahwa terdapat hubungan yang sangat rendah antara variabel X (persepsi *muzakki* tentang kontroversi hukum zakat profesi) dengan variabel Y (kesadaran berzakat).

Sedangkan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan atau tidak antara variabel X (persepsi *muzakki* tentang kontroversi hukum zakat profesi) dengan variabel Y (kesadaran berzakat) dapat diketahui dengan cara membandingkan ρ_{hitung} dan ρ_{tabel} . Berdasarkan tabel rho untuk $n = 25$, dengan taraf signifikansi 5% dapat diperoleh nilai $\rho_{tabel} = 0,409$ (lihat lampiran) dan $\rho_{hitung} = 0,163$. Dari nilai rho tersebut, dapat diketahui nilai ρ_{hitung} lebih kecil dari ρ_{tabel} ($0,163 < 0,409$). Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan antara persepsi *muzakki* tentang kontroversi hukum zakat profesi dengan tingkat kesadaran berzakat *muzakki* (khususnya dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon).

b. Analisis Koefisien Regresi

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh apa yang ditimbulkan dari persepsi *muzakki* tentang kontroversi hukum zakat profesi terhadap tingkat kesadaran berzakat, peneliti menggunakan rumus regresi linier sederhana, yakni:

$$Y = a + bX$$

Dalam hal ini peneliti menggambarkan persepsi *muzakki* tentang kontroversi hukum zakat profesi pada ordinat X dan tingkat kesadaran berzakat pada ordinat Y, jika ditarik suatu garis lurus inilah yang disebut dengan garis regresi. Adapun persamaannya adalah $Y = a + bX$, persamaan tersebut menunjukkan hubungan linier Y dengan X. jika telah

diketahui nilai X dan Y, maka estimasi nilai a dan b dengan mudah dapat ditentukan. (dapat dilihat pada lampiran 16)

Adapun nilai a didapat dari:

$$\begin{aligned}
 a &= \frac{(\sum Y)(\sum X^2) - (\sum X)(\sum XY)}{n(\sum X^2) - (\sum X)^2} \\
 &= \frac{(1012)(80755) - (1409)(57425)}{25(80755) - (1409)^2} \\
 &= \frac{812235}{33594} \\
 &= 24,178
 \end{aligned}$$

Sedangkan nilai b didapat dari:

$$\begin{aligned}
 b &= \frac{n(\sum XY) - (\sum X)(\sum Y)}{n(\sum X^2) - (\sum X)^2} \\
 &= \frac{25(57425) - (1409)(1012)}{25(80755) - (1409)^2} \\
 &= \frac{9717}{33594} \\
 &= 0,289
 \end{aligned}$$

Dengan persamaan diatas dapat diprediksi ke dalam variabel dependen yang akan terjadi bila variabel independen ditetapkan. Bila nilai persepsi *muzakki* tentang kontroversi hukum zakat profesi dinaikan 1(X = 1), maka tingkat kesadaran berzakat dalam persamaan regresinya adalah Y = 24,178 + (0,289 . 1) = 24,467.

Dari persamaan regresi diatas dapat disimpulkan bahwa apabila nilai persepsi *muzakki* tentang kontroversi hukum zakat profesi bertambah 1, maka nilai rata-rata tingkat kesadaran berzakat justru naik sebesar 24,467. Hal ini menunjukkan bahwa kontroversi hukum zakat profesi tidak menghalangi *muzakki* untuk tetap menunaikan kewajiban zakatnya.

c. Analisis Koefisien Determinasi (Koefisien Penentu)

Analisis selanjutnya adalah koefisien determinasi (penentu) yakni untuk mengetahui kontribusi variabel X (persepsi *muzakki* tentang kontroversi hukum zakat profesi) terhadap variabel Y (kesadaran berzakat). Rumus yang digunakan adalah $KD = r^2 \times 100\%$. Berdasarkan nilai koefisien korelasi *spearman rank* yang diperoleh adalah $r = 0,163$, maka dapat diketahui koefisien determinasinya adalah:

$$\begin{aligned} KD &= r^2 \times 100 \% \\ &= 0,163^2 \times 100 \% \\ &= 2,66 \% \end{aligned}$$

Dari uji determinasi (penentu) diperoleh nilai sebesar 2,66%, hal ini berarti bahwa pengaruh yang ditimbulkan dari adanya isu kontroversi hukum zakat profesi terhadap tingkat kesadaran berzakat bagi para *muzakki* hanya sekitar 2,66%, atau dapat dikatakan adanya kontroversi

tersebut tidak memberikan pengaruh besar bagi peranan mereka sebagai *muzakki* untuk menunaikan kewajiban zakat.

d. Pengujian Hipotesis Penelitian

Hipotesis pengujian asosiatif pada analisis ini adalah:

- a. Ho: Artinya tidak terdapat pengaruh antara persepsi muzakki tentang kontroversi hukum zakat profesi terhadap tingkat kesadaran berzakat.
- b. Ha : Artinya terdapat pengaruh antara persepsi muzakki tentang kontroversi hukum zakat profesi terhadap tingkat kesadaran berzakat.

Sedangkan untuk menguji ada tidaknya pengaruh positif yang ditimbulkan variabel X (persepsi muzakki tentang kontroversi hukum zakat profesi) terhadap variabel Y (kesadaran berzakat).Peneliti menggunakan rumus distribusi t student (uji t).dan perhitungannya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 t &= \dots \sqrt{\frac{n - 2}{1 - \dots^2}} \\
 &= 0,163 \sqrt{\frac{25 - 2}{1 - 0,163^2}} \\
 &= 0,163 \sqrt{\frac{23}{1 - 0,026569}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= 0,163 \sqrt{\frac{23}{0,973}} \\
&= 0,163 \times 4,862 \\
&= 0,793
\end{aligned}$$

Nilai t_{tabel} berdasarkan tingkat signifikansi yang digunakan dengan db $= n-2$ ($25-2 = 23$) dan 5% (0,05) diperoleh t_{tabel} sebesar 2,069 (lihat tabel pada lampiran 19), sehingga diperoleh t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($0,793 < 2,069$). Dengan demikian keputusannya adalah H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak terdapat pengaruh yang positif antara persepsi *muzakki* tentang kontroversi hukum zakat profesi dengan kesadaran berzakat *muzakki*.

2. Analisis Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar *muzakki* yang menjadi objek dalam penelitian ini (dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon) menganggap bahwa zakat profesi itu wajib hukumnya, sebagaimana zakat pada umumnya. Sedangkan peneliti sendiri menganggap zakat profesi sebagai produk hukum baru yang muncul seiring perkembangan zaman, tentunya ini berkaitan dengan kepercayaan umat muslim terhadap keistimewaan Al-qur'an yang mampu menembus dimensi waktu. Hal ini berarti bahwa kapan dan dimanapun umat muslim mengalami problem seputar ajaran Islam, maka Al-qur'an dapat dijadikan solusi yang dapat menjawabnya. Peringatan dan

perintah-perintah yang ada pada Al-qur'an bersifat permanen, tinggal bagaimana umat Islam memaknai dan menafsirkan setiap isi kandungannya dengan baik. Maka dalam hal ini peneliti sepakat dengan para *muzakki* yang menyatakan bahwa hukum zakat profesi wajib bagi para professional yang penghasilannya mencapai batas nishab.

Selain itu, jika kita menengok zakat dari segi eksistensinya, maka keberadaan zakat tidak hanya berdampak pada peningkatan perekonomian *mustahiq*, melainkan juga beberapa hikmah zakat mampu menjadikan pribadi *muzakki* lebih baik lagi, lebih dekat kepada Allah SWT, peka terhadap lingkungannya, serta yang terpenting bahwa *muzakki* sebagai muslim *surplus* (penghasilannya melampaui batas nishab) mampu membatasi perilaku konsumtifnya demi kepentingan konsumsi pihak *deficit* (*mustahiq*). Dengan demikian, nilai-nilai yang terkandung dari zakat mampu menjadikan umatmuslim berperilaku ekonomi sesuai dengan syariat Islam.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam disusun bertujuan untuk membangun keadilan sosial dan kemajuan perekonomian melalui *redistribusi income* yang lebih sesuai untuk kelompok miskin dan kelompok yang membutuhkan. Bahkan *nash* Al-qur'an dan Hadits menekankan pembelaan Islam terhadap upaya pemerataan kesejahteraan dengan membatasi perilaku konsumtif muslim *surplus* demi kepentingan konsumsi pihak *deficit*.⁵

⁵ M. Arief Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 214

Secara teoritis standar kemaslahatan seorang muslim dari kepemilikan pendapatan/aset *surplus* (melampaui batas nishab) difungsikan sebagai berikut: $Y = C + Z$, dimana penghasilan yang mereka dapatkan (Y) mereka gunakan untuk kebutuhan konsumsi (C), selebihnya jika hartanya mencapai nishab maka sebagian dari hartanya mereka keluarkan untuk berzakat (Z). Di lain pihak untuk strata sosial *mustahiq* dapat difungsikan dalam persamaan berikut: $Y + Z = C$, dimana penghasilan sehari-hari yang mereka dapatkan (Y) ditambah dengan dana zakat yang mereka terima (Z), akan mampu menutupi kebutuhan konsumsi mereka (C).⁶ Dari ilustrasi kedua fungsi ini, upaya menyelaraskan pola *redistribusi income* islami (sistem zakat), etika perilaku konsumsi dari pihak *surplus* maupun *deficit* mempunyai peranan yang tidak bisa diabaikan atau bahkan pengaruh dari prinsip-prinsip Islam akan bergantung pada perilaku pengeluaran konsumen.⁷

Dalam ilmu ekonomi dinyatakan bahwa manusia adalah makhluk ekonomi yang selalu berusaha memaksimalkan kepuasannya dan selalu bertindak rasional. Para konsumen akan selalu berusaha memaksimalkan kepuasannya selama kemampuan finansialnya memungkinkan.⁸ Namun, dengan adanya ketegasan hukum Islam mengenai kewajiban menunaikan zakat, perilaku konsumtif muslim *surplus* akan sangat dibatasi olehnya. Dan

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*, h. 216

⁸ *Ibid.*, h. 217 - 218

kesadaran mereka untuk menunaikannya tentu akan sangat berpengaruh pada konsumsi pihak *deficit* (kelompok yang membutuhkan).

Sementara hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran berzakat dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon dapat dikatakan cukup tinggi. Ini berbanding terbalik dengan isu dilapangan yang menyatakan bahwa tingkat kesadaran umat muslim di Indonesia untuk menunaikan kewajiban zakat *m l* masih sangat rendah. Dari fakta tersebut peneliti mencoba menyimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman seseorang tentang makna dan nilai zakat ternyata ikut mempengaruhi kesadaran orang tersebut untuk menunaikan zakat. Dan dengan atau tanpa kita sadari, perilaku zakat *muzakki* ini telah mencerminkan aktualisasi prinsip-prinsip Islam dalam upaya pemerataan kesejahteraan dan pembangunan perekonomian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, yakni mengenai persepsi *muzakki* tentang kontroversi hukum zakat profesi dan pengaruhnya terhadap tingkat kesadaran berzakat. Maka, peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Para *muzakki* memandang permasalahan kontroversi zakat profesi sebagai dampak dari masyarakat muslim kita yang masih mempelajari Islam hanya sebatas tekstual saja, sehingga wajar jika muncul anggapan bahwa Al-qur'an dan sunah tidak memuat aturan hukum yang tegas mengenai zakat profesi. Bagi mereka (dosen IAIN Syekh Nurjati Cirebon), semua jenis profesi wajib dikeluarkan zakatnya selama profesi tersebut jelas dan tidak keluar dari koridor ajaran Islam, dan penghasilannya telah mencapai nishab. Dan untuk ketentuan lain zakat profesi, sebagian besar dari mereka menyamakannya dengan zakat pada umumnya, yakni ada masa haul, dengan nishab 85 gram emas dan prosentase zakat sebesar 2,5%.
2. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat kesadaran berzakat responden dapat dikatakan cukup baik. Mereka mengaku tidak terganggu dengan adanya isu mengenai kontroversi hukum zakat profesi tersebut, serta sebagian besar dari mereka telah sepakat dengan diwajibkannya zakat profesi. Bahkan mereka

tidak ragu untuk menjalankan perannya sebagai *muzakki*, yakni menunaikan kewajiban zakat. Meski ternyata masih ada beberapa *muzakki* yang kesulitan dalam menentukan batas nishab, haul serta prosentase perhitungan zakat profesi. Dan ini yang menyebabkan sebagian dari mereka mengaku lebih fleksibel dalam menunaikan zakatnya (tidak sepenuhnya mengikuti syarat dan ketentuan zakat profesi).

3. Hubungan antara kontroversi hukum zakat profesi dengan kesadaran berzakat para *muzakki* ditunjukkan dengan perolehan nilai koefisien korelasi *spearman rank* () sebesar 0,163, termasuk dalam kategori sangat rendah. Sementara dari perhitungan koefisien regresi, menunjukkan bahwa apabila nilai persepsi *muzakki* tentang kontroversi hukum zakat profesi bertambah 1, maka nilai rata-rata tingkat kesadaran berzakat justru naik sebesar 24,467. Ini menunjukkan bahwa kontroversi hukum zakat profesi tidak menghalangi *muzakki* untuk tetap menunaikan kewajiban zakatnya. Hal ini diperkuat dengan diterimanya H_0 serta ditolaknya H_a dengan nilai ρ_{hitung} lebih kecil dari ρ_{tabel} ($0,163 < 0,409$) dan t_{hitung} lebih kecil dari t_{tabel} ($0,793 < 2,069$). Serta berdasarkan analisis koefisien determinasi pengaruh yang ditimbulkan dari kontroversi tersebut terhadap tingkat kesadaran berzakat hanya sebesar 2,66%. Hal ini berarti bahwa pengaruh yang ditimbulkan sangat kecil.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka perkenankan peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat muslim pada umumnya, alangkah baiknya jika kita mau mempelajari ajaran Islam tidak sebatas tekstual saja. Tetapi cobalah untuk mengkaji dan memperdalam makna dari ayat-ayat Al-qur'an dan sunah Rasulullah saw. Karena dengan begitu, apapun permasalahannya yang menyangkut agama dan kehidupan kita kini dan nanti, pasti akan mampu kita temukan jalan keluarnya.
2. Bagi para *muzakki* yang pro dengan diwajibkannya hukum zakat profesi dan telah menunaikan kewajiban zakatnya, maka pertahankan argumen anda. Karena tidak akan pernah ada ruginya menginvestasikan harta kita dijalan Allah, apapun bentuknya.
3. Bagi para professional yang penghasilannya telah mencapai batas nishab namun belum menunaikan kewajiban zakatnya karena terganggu dengan adanya kontroversi hukum zakat profesi, cobalah untuk berpikir positif menanggapi permasalahan ini. Jangan hanya melihat zakat profesi dari sisi kita sebagai *muzakki* yang wajib menunaikan zakat, tapi cobalah untuk melihat dari sisi mereka sebagai *mustahiq* yang membutuhkan uluran tangan kita. Dengan begitu apapun nama dan bentuknya, memberikan sebagian harta kita untuk mereka tidak lagi kita jadikan sebagai beban.

DAFTAR PUSTAKA

- Abisyakir. *Kontroversi Hukum “Zakat Profesi”*. 2009. Artikel dalam, <http://abisyakir.wordpress.com/category/01-islam/page/2/> Diakses pada 19 Januari 2010
- Abu Zahrah, Muhammad. *Zakat dalam Perspektif Sosial*. Cet. I. Jakarta: PT Pustaka Firdaus. 1995
- Al-Zuhayly, Wahbah. *Kajian Berbagai Madzhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1997
- Apriansyah. *Kontroversi zakat Profesi*. 2009. Artikel dalam, <http://www.facebook.com/topic.php?uid=50167786247&topic=11301> Diakses pada 19 Januari 2010
- Arfawie Kurde, Nukthoh. *Memungut Zakat dan Infaq Profesi*. Cet. I. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005
- Arief Mufraini, M. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Cet. II. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008
- Arif Budiman, Moch. *Mari Zakat Berjamaah*. 2009. Artikel dalam, <http://suarapembaca.detik.com/read/2009/09/15/115709/1203808/471/zakah-berjamaah> Diakses pada 10 Januari 2010
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 1996
- As-Syahatah, Husein. *Akuntansi Zakat: Panduan Praktis Penghitungan Zakat Kontemporer*. Cet I. Jakarta: Pustaka progressif. 2004
- Ash-Shiddiqiy, Hasbi. *Pedoman Zakat*. Jakarta: PT Bulan Bintang. 1991
- Burhan Bungin, M. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2008
- Ensiklopedi Islam*. Jilid 5. Cet I. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. 1993.

Google Translate Indonesian to Indonesia. <http://artikata.com/arti-348508-sadar.php>
Diakses pada 29 September 2010

Hidayat, Yayat. *Zakat Profesi: Solusi Mengentaskan Kemiskinan Ummat*. Cet II. Cirebon: Pangger Press. 2007

Hilman Najat, Dadang. *Identifikasi Faktor yang Menyebabkan Perilaku Muzakki dalam Mengeluarkan Zakat Maal Melalui Lembaga Pengelolaan Zakat di Kota Bandung*. 2001. Artikel dalam, <http://digilib.itb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&id=jbptit-gdl-dadanghilm-32337> Diakses pada 29 September 2010

Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa. 1991

Quraish Shihab, M. *Fatwa-fatwa Quraish Shihab: Seputar Ibadah Mahdah*. Cet I. Bandung: Mizan. 1999

Syatori Nasehuddin, Toto. *Metodologi Penelitian: Sebuah Pengantar*. Cirebon: STAIN. 2008

Tholabi Kharlie, Ahmad. *Kesadaran Rendah Kepercayaan Lemah*. 2009. Artikel dalam, <http://klipimgut.wordpress.com/2009/11/30/kesadaran-rendah-kepercayaan-lemah> Diakses pada 11 Oktober 2010

Tim Prima Pena. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Gita Media Press. 2006

Yazid, M. *Zakat Kasb Al'-Amal wa Al-Mihan Al-Hurrah*. 2009. Artikel pada <http://tanbihun.com/fikih/bahsul-masail/zakat-profesi> Diakses pada 11 Juli 2010